

**ANALISIS PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN, DAN
AKUNTANSI PADA LAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS
KANTOR DESA CONDRO KECAMATAN PASIRIAN
KABUPATEN LUMAJANG)**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
Lailatul Nur Faizah
NIM: 201105030006

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
APRIL 2024**

**ANALISIS PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN, DAN
AKUNTANSI PADA LAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS
KANTOR DESA CONDRO KECAMATAN PASIRIAN
KABUPATEN LUMAJANG)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

Lailatul Nur Faizah
NIM: 201105030006

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
APRIL 2024**

**ANALISIS PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN, DAN
AKUNTANSI PADA LAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS
KANTOR DESA CONDRO KECAMATAN PASIRIAN
KABUPATEN LUMAJANG)**

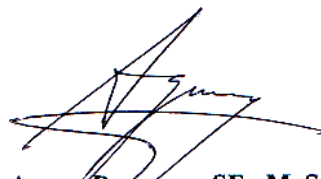
SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh:

Lailatul Nur Faizah
NIM: 201105030006
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing


Agung Parmono, SE., M. Si
NIP. 197512162009121002

**ANALISIS PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN, DAN
AKUNTANSI PADA LAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS
KANTOR DESA CONDRO KECAMATAN PASIRIAN
KABUPATEN LUMAJANG)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Kamis

Tanggal : 4 April 2024

Tim Penguji

Ketua

Nur Ika Mauliyah, M. Ak
NIP. 198803012018012001

Sekretaris

Hikmatul Hasanah, S.E.L., M.E.
NIP. 198006262023212017

Anggota :

1. Dr. Retna Anggitaningsih, SE., MM (.....)

2. Agung Parmono, SE., M.Si (.....)

Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Retna Anggitaningsih, M.Ag
NIP. 196812011996031001

MOTTO

يٰۤاٰدُوۤدُ اِنَّا جَعَلٰنٰكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰحْكُمۡ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى
فَيُضِلَّكَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَظِلُّوۡنَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيۡدٌۢ بِمَا
نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya: Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan (Q.S As-Shad ayat 26).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wasyukurillah wa ala nikmatillah, segala puji Syukur bagi Allah SWT atas limpahan Rahmat, taufiq, dan inayahnya kepada penulis beserta keluarga dan saudara lainnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Cinta pertama dan panutanku, Bapak tercinta Nur Kholim, Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai dengan bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, mendoakan, memberikan, semangat dan motivasi tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Pintu surgaku, Ibu tercinta Ba'ati, terima kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat dan doa yang diberikan selama ini. Terima kasih atas nasihat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Ibu menjadi pengingat dan penguat paling hebat. Terima kasih, sudah menjadi tempatku untuk pulang.
3. Kedua nenekku yang sangat ingin melihat penulis sampai ke jenjang sarjana, beliau tak hentinya mengingatkan penulis untuk selalu rajin, tekun selama menjalankan study ini, sehingga perkataan beliau yang selalu melekat di ingatan penulis
4. Kedua kakak ku tersayang. Yayuk Elok dan Rizal Mashuri, yang selalu memberikan inspirasi untuk terus melangkah maju kedepan, menjadi

teman bertukar pikiran, tempat berkeluh kesah, dan menjadi *support system* terbaik bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.

5. Adik-adikku. Rizki dan Zizi. Terima kasih sudah menjadi *Mood booster* untuk penulis dalam proses menempuh pendidikan selama ini, tumbuhlah menjadi versi paling hebat adik-adikku.
6. Teman-temanku Akuntansi Syariah 1 khususnya (melisa, mila, fia, zulaiha) terima kasih sudah mensupport, memberikan motivasi, dan semangat kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir dengan tepat waktu.
7. Almamaterku tercinta tempat saya menimba ilmu yaitu Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program studi Akuntansi Syariah yang telah mendidikku baik dari segi ilmu maupun agama.
8. Kantor Desa Condoro, khususnya kepada Bpk Supirno, Bpk Badriyo, Bpk Feri, & Bpk Wawan, terimakasih sudah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya milik Allah SWT, yang telah memberikan penulis kenikmatan, baik nikmat Iman, Islam dan kesehatan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul, “Analisis Penganggaran, Penatausahaan, dan Akuntansi Pada Laporan Keuangan (Studi Kasus Kantor Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang)”. Didalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, SE., M.Ak selaku Kaprodi Jurusan Akuntansi Syariah.
5. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, SE., M.Ak selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Agung Parmono, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing.
7. Supirno S.sos selaku Kepala Desa Condro Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang beserta seluruh perangkat desa yang telah memberikan izin dan membantu penulis dalam melakukan penelitian skripsi.

8. Segenap informan yang telah berkenan memberikan informasi yang dibutuhkan, sehingga membantu proses penyelesaian skripsi.
9. Seluruh Tim Penguji Skripsi.

Penulis menyadari sepenuhnya di dunia ini tidak ada yang sempurna begitu juga dalam penulisan skripsi ini, yang tidak luput dari kekurangan dan kesalahan serta jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bertujuan untuk menyempurnakan skripsi ini penulis sangat mengharap dengan segala ketulusan dan kerendahan hati. Semoga skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan bagi penulis dan pembaca.

Jember, 06 November 2023



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Lailatul Nur Faizah
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
NIM. 201105030006

ABSTRAK

Lailatul Nur Faizah, Agung Parmono, Analisis Penganggaran, Penatausahaan, dan Akuntansi Pada Laporan Keuangan (Studi Kasus Kantor Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang)

Kata kunci: Penganggaran, Penatausahaan, Akuntansi, dan Laporan Keuangan

Desa memiliki peluang besar untuk mengawasi administrasi dan mendorong kemajuan dalam meningkatkan kesejahteraan serta mutu hidup masyarakatnya. Berdasarkan fenomena yang terjadi di Kantor Desa Condro, terlihat bahwa Desa mengalami keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi. Kondisi ini bisa menjadi penghambat dalam proses penganggaran, penatausahaan, dan akuntansi yang efisien.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka fokus peneliti dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana proses Penganggaran, Penatausahaan, dan Akuntansi di Kantor Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang? 2. Bagaimana kesesuaian proses Penganggaran, Penatausahaan, dan Akuntansi di Kantor Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang dengan standar di Indonesia?

Tujuan penelitian ini yaitu: 1. Untuk mengetahui Penganggaran, Penatausahaan, dan Akuntansi di Kantor Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. 2. Untuk mengetahui kesesuaian Penganggaran, Penatausahaan, dan Akuntansi di Kantor Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang dengan standar di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif sedangkan jenis penelitiannya yaitu deskriptif. Dalam penentuan sumber data menggunakan teknik *purposive*, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan kualitatif deskriptif. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1. Proses penganggaran, penatausahaan, dan akuntansi di Kantor Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang melibatkan seluruh *stakeholder* Desa serta mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. 2. Proses penganggaran, penatausahaan, dan akuntansi di Kantor Desa Condro mengikuti standar yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Standar penganggaran di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip dasar penganggaran.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| ABTRAK | x |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| DAFTAR TABEL | xv |
| DAFTAR GAMBAR | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Konteks Penelitian | 1 |
| B. Fokus Penelitian..... | 5 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Definisi Istilah..... | 7 |
| F. Sistematika Pembahasan | 10 |
| BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN..... | 12 |
| A. Penelitian Terdahulu..... | 12 |
| B. Kajian Teori..... | 22 |
| 1. PSAK No.1..... | 22 |
| 2. Penganggaran | 23 |

| | |
|---|-----------|
| 3. Penatausahaan | 25 |
| 4. Akuntansi | 26 |
| 5. Laporan Keuangan | 26 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 29 |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian..... | 29 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 29 |
| C. Subyek Penelitian..... | 30 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 30 |
| E. Analisis Data | 32 |
| F. Keabsahan Data..... | 33 |
| G. Tahap-tahap Penelitian..... | 34 |
| BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS | 35 |
| A. Gambaran dan Obyek Penelitian..... | 35 |
| B. Penyajian Data dan Analisis..... | 62 |
| C. Pembahasan Temuan..... | 76 |
| BAB V PENUTUP | 83 |
| A. Kesimpulan | 83 |
| B. Saran..... | 85 |
| DAFTAR PUSTAKA | 86 |

DAFTAR TABEL

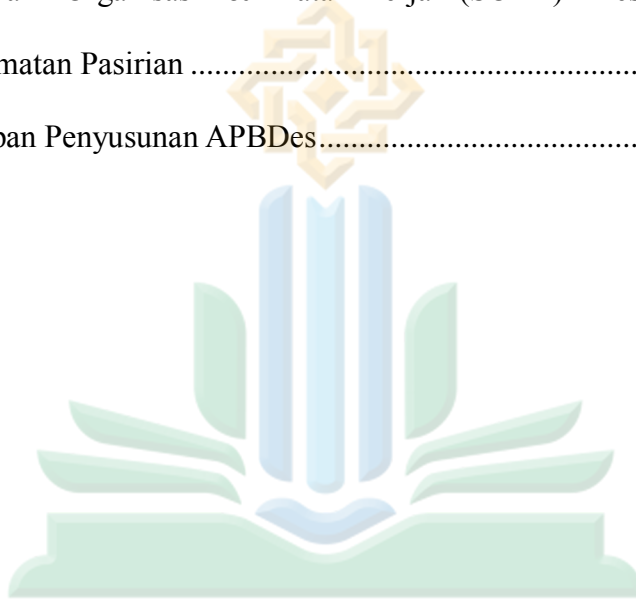
| No. | Uraian | Hal |
|-----|--|-----|
| 2.1 | Ringkasan Penelitian Terdahulu | 20 |
| 4.1 | Perkembangan Kependudukan Tahun 2015-2020 | 37 |
| 4.2 | Perkembangan Jumlah Peserta KB dan PUS Tahun 2015-2019 | 38 |
| 4.3 | Data Sebaran Penduduk Desa Per Wilayah | 38 |
| 4.4 | Data Wilayah Administrasi Desa Condro | 39 |
| 4.5 | Anggaran Pendapatan & Belanja Desa 2023 | 68 |
| 4.6 | Ringkasan Penganggaran, Penatausahaan, dan akuntansi berdasarkan standar di Kantor Desa dan di Indonsia | 80 |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

| No. | Uraian | Hal |
|-----|--|-----|
| 4.1 | Peta Desa Condro | 36 |
| 4.2 | Susunan Organisasi & Tata Kerja (SOTK) Desa Condro Kecamatan Pasirian | 52 |
| 4.2 | Tahapan Penyusunan APBDes..... | 66 |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur ulang tata kelola Desa dengan undang-undang yang berbeda setelah sebelumnya Desa diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Kota Praja dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Kota.² Desa memiliki peluang besar untuk mengawasi administrasi dan mendorong kemajuan dalam meningkatkan kesejahteraan serta mutu hidup masyarakatnya. Di masa depan, diharapkan Pemerintah Desa dapat memiliki kebebasan lebih dalam mengatur pemerintahan dan sumber daya alamnya, termasuk pengelolaan dana Desa dan aset Desa. Berdasarkan fenomena yang terjadi di Kantor Desa Condro, terlihat bahwa Desa mengalami keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi. Kondisi ini bisa menjadi penghambat dalam proses penganggaran, penatausahaan, dan akuntansi yang efisien.

Pendapatan Desa berasal dari berbagai sumber, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 72 menyebutkan bahwa pendapatan Desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi masyarakat, gotong royong, alokasi APBN, pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, hibah, sumbangan pihak ketiga, dan pendapatan

² Dr. Rahyunir Rauf, M.Si, Sri Maulidiah, S.Sos, M.Si, "Pemerintahan Desa", (Yogyakarta: zanafa publishing: 2015), hal 2.

Desa yang sah. Pendapatan asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan skala lokal Desa.

Penatausahaan melibatkan kegiatan seperti mencatat, menginventarisasi, dan melaporkan barang milik negara/daerah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Bendahara bertanggung jawab untuk mengelola semua uang dan dokumen penting di BLUD. Berbeda dengan unit kerja non-BLUD, di BLUD terdapat prosedur khusus untuk penyaluran dana oleh bendahara dan penerimaannya oleh bendahara pengeluaran. Sementara itu, akuntansi merupakan metode untuk mengidentifikasi, mencatat, mengklasifikasikan, dan menganalisis informasi. Keuangan adalah proses pencatatan transaksi secara terstruktur untuk menjaga keseimbangan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku.³

Laporan keuangan digunakan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas di sektor publik dengan menyediakan informasi yang terkonsolidasi kepada pemangku kepentingan yang lebih luas. Laporan keuangan berperan sebagai sarana komunikasi dengan pengguna informasi dan pihak yang terlibat dalam aktivitas keuangan pemerintah. Menurut *Financial Accounting Standards Boards (FASB)*, karakteristik kualitatif yang diperlukan dalam pelaporan keuangan yang baik meliputi relevansi, komparabilitas, kemudahan pemahaman, materialitas, serta manfaat dan biaya.

³ Rizka Yunika Ramly, "Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Rumah Sakit Terhadap Kewajaran Laporan Keuangan (studi pada rumah sakit umum daerah toto kabila kabupaten bone bolango)", *"Jurnal Akmen"*, 17, No. 1 (2020), 145-162, diakses pada tanggal 22 Desember 2023 pada jam 18.35

Pengelolaan keuangan Desa harus mencerminkan pencapaian kinerja yang positif demi kepentingan masyarakat Desa.⁴

Seperti instansi pemerintah lainnya, perangkat Desa juga berusaha untuk menghindari pemborosan dan tindakan yang dianggap merugikan serta berdampak negatif pada keuangan Desa. Untuk memastikan keamanan dalam pengelolaan keuangan, penting untuk menerapkan sistem akuntansi keuangan yang sesuai. Sistem akuntansi keuangan memegang peranan penting dalam pemerintahan Desa karena berfungsi sebagai alat untuk mengatur aktivitas keuangan dan melindungi aset Desa. Akuntansi keuangan Desa, yang merupakan bagian dari akuntansi sektor publik, semakin mendapatkan perhatian dari masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Desa bahwasanya perangkat Desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam menjalankan seluruh tugas pemerintahan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengelolaan, pelaporan, hingga pemantauan. Hal ini mendorong Desa untuk meningkatkan potensi yang dimiliki guna membangun dan mengembangkan Desa mereka.⁵

Peraturan pemerintah dalam negeri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa menyatakan bahwa pengelolaan keuangan Desa mencakup semua aktivitas seperti perencanaan, implementasi, administrasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Pengelolaan keuangan

⁴ Arif Rivan, dkk “Penerapan Sistem Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa”, *Jurnal Administrasi Publik*, kemendikbud, 09, No. 2 (2019), 92-100, diakses pada tanggal 23 Desember 2023 pada jam 21.58

⁵ Gloria S. Lumingkewas, “Kepatuhan Aparatur Desa Dalam Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018”, (Studi Kasus Pada Desa Taraitak Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa)”, *Jurnal EMBA*, Universitas Sam Ratulangi, 09, No. 1 (2019). 163-172. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2023, pada jam 21.46

Desa merupakan serangkaian proses yang saling terkait antara satu tahap dengan tahap berikutnya. Keuangan Desa harus dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta disiplin sesuai dengan anggaran. Proses dan prinsip pengelolaan keuangan Desa harus dijalankan oleh setiap Desa, didukung oleh masyarakat Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa harus terencana dengan baik agar visi Desa dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Manajemen keuangan Desa bertujuan untuk mendukung pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pengelolaan keuangan Desa merupakan bagian integral dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan, dan pengawasan. Keberhasilan pengelolaan keuangan Desa sangat bergantung pada tata kelola pemerintahan Desa yang efektif. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari pihak di luar pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seperti tokoh masyarakat sangatlah penting.⁶

Keistimewaan penganggaran, penatausahaan, dan akuntansi pada laporan keuangan dapat mencakup berbagai aspek yaitu: Transparansi dan Akuntabilitas. Penganggaran, penatausahaan, dan akuntansi yang baik akan mencerminkan transparansi dan akuntabilitas yang baik dalam pengelolaan keuangan. Hal ini dapat dipastikan bahwa laporan keuangan dapat dijelaskan dengan jelas dan dipertanggungjawabkan. Kepatuhan terhadap Standar akuntansi: Penatausahaan dan akuntansi mengikuti standar yang ditetapkan

⁶ Abdul Halim, *Isu Konteporer Akuntansi Publik*, (Surabaya: UNITOMO PRESS, 2020), 199

oleh badan regulasi atau otoritas jasa keuangan akan memberikan kepercayaan dan kredibilitas terhadap laporan keuangan. Efisiensi dan Efektivitas: Penganggaran yang efisien dan penatausahaan yang tepat dapat memastikan alokasi sumber daya yang optimal, sementara akuntansi yang baik memungkinkan evaluasi yang efektif terhadap performa keuangan. Kepatuhan Terhadap Peraturan: keistimewaan lainnya termasuk kesesuaian dengan perundang-undangan yang berlaku dalam penganggaran, penatausahaan, dan akuntansi. Setiap lembaga pemerintahan memiliki karakteristik unik yang sesuai dengan kebutuhan dan konteksnya. Meskipun demikian, dapat menjamin bahwa proses tersebut dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat tambahan dalam pengelolaan keuangan.

berdasarkan informasi yang sebelumnya, penulis termotivasi untuk melaksanakan penelitian yang berjudul **“Analisis Penganggaran, Penatausahaan, dan Akuntansi Pada Laporan Keuangan (Studi Kasus Kantor Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang)”**

B. Fokus Penelitian

Sebelum masuk pada fokus penelitian, penulis menjabarkan pengertian fokus penelitian. Fokus penelitian adalah suatu pernyataan yang menunjukkan perbedaan antara argumentasi dan realisasi dalam rencana pelaksanaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah di jabarkan, maka fokus peneltia dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses Penganggaran, Penatausahaan, dan Akuntansi di Kantor Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang?

2. Bagaimana kesesuaian proses Penganggaran, Penatausahaan, dan Akuntansi di Kantor Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang dengan standar di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Penganggaran, Penatausahaan, dan Akuntansi di Kantor Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.
2. Untuk mengetahui kesesuaian Penganggaran, Penatausahaan, dan Akuntansi di Kantor Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang dengan standar di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yaitu dampak yang direalisasikan dari sebuah tujuan. Oleh karena itu, penulis dapat memberikan kontribusi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis yang dapat dikontribusikan pada penelitian ini adalah menambah/memperbanyak kajian tentang Analisis Penganggaran, Penatausahaan, dan Akuntansi Pada Laporan Keuangan.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi penulis tentang Analisis Penganggaran, Penatausahaan, dan Akuntansi Pada Laporan Keuangan.

b. Bagi Almamater

Penelitian ini diharapkan bisa ditambahkan ke dalam daftar Pustaka penelitian yang ada di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program studi Akuntansi Syariah diharapkan dapat menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya.

c. Bagi Kantor Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai informasi di Kantor Desa Condro mengenai ilmu dan teori yang penulis dapatkan dimasa perkuliahan serta dapat memberikan kontribusi tentang Analisis Penganggaran, Penatausahaan, dan Akuntansi Pada Laporan Keuangan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah menjelaskan makna dari istilah yang ditekankan dalam judul penelitian. Definisi tersebut bertujuan untuk mencegah adanya kesalahpahaman atas interpretasi istilah yang dimaksud oleh penulis.

1. Penganggaran

Manajemen keuangan Desa atau pengelolaan keuangan Desa adalah proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian keuangan Desa, termasuk pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan, yang diatur dalam pengelolaan keuangan Desa dan dinilai secara finansial dalam satu periode tahunan anggaran. Kegiatan perencanaan meliputi perancangan perencanaan dan strategis keuangan dalam periode jangka waktu tertentu seperti RPJMD dan RKPD. Sedangkan kegiatan pengorganisasian meliputi pengorganisasian anggaran-anggaran Desa seperti penerimaan, belanja/pengeluaran, dan pendapatan.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa didasarkan pada asas dan prinsip menuju keefektifan dan keefisienan yang harus dilakukan oleh aparat pelaksana. Dalam pengelolaan keuangan Desa, dibutuhkan akuntabilitas berupa pertanggungjawaban melalui laporan keuangan Desa yang disusun dan dipublikasikan setiap tahun anggaran.⁷

2. Penatausahaan

Menurut Peraturan Pemerintah dalam Negeri No. 113 tahun 2014, pendapatan Desa berasal dari sumber pendapatan asli Desa dan penerimaan pembiayaan. Pengeluaran kas oleh Pemerintah Desa terdiri dari APBD yang digunakan untuk bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, dan pembinaan masyarakat.

⁷ Dr. Riant Nugroho, Manajemen Keuangan Desa Bagian 2: Perencanaan Keuangan Desa, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo), 2021

Peraturan Pemerintah dalam Negeri No. 113 tahun 2014 mengamanatkan bahwa tata cara pencatatan penerimaan dan pengeluaran harus dilaksanakan dengan menggunakan buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank. Buku kas umum berfungsi untuk mencatat transaksi uang tunai yang dikelola oleh bendahara Desa, sementara buku pembantu pajak digunakan untuk mencatat penyetoran uang tersebut ke rekening negara. Buku bank, pada sisi lain, digunakan untuk mencatat segala mutasi antara penyetoran bank ke rekening kas Desa dan penarikan dari rekening kas Desa ke rekening bank.

3. Akuntansi

Standar Akuntansi Pemerintahan yang diatur oleh Perpu nomor 71 tahun 2010 merupakan proses penting dalam mengelola keuangan pemerintah. Akuntansi meliputi berbagai langkah seperti identifikasi, pencatatan, pengukuran, klasifikasi, rekapitulasi, dan analisis data finansial. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa juga menegaskan pentingnya pemerintah desa untuk mandiri dalam mengelola sumber daya alam dan keuangan Desa. Proses pengelolaan keuangan Desa termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.⁸

4. Laporan Keuangan

Secara keseluruhan, administrasi keuangan adalah serangkaian aktivitas yang diatur oleh suatu perusahaan atau organisasi agar efisien

⁸Dr. Izza Mafruhah, SE, M.Si, Dkk, Data dan Informasi Manfaat Dana Desa di Provinsi Jawa Tengah, (Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi), 2018.

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen keuangan memfokuskan pada aspek keuangan yang mencakup evaluasi dan pengambilan keputusan, kedua aspek tersebut saling terkait karena keputusan finansial suatu perusahaan bergantung pada evaluasi yang dilakukan. Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyajikan laporan mengenai posisi keuangan, pelaksanaan dan perubahan posisi anggaran suatu Perusahaan yang berguna bagi semua pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan.

Laporan keuangan mencakup informasi dari laporan realisasi anggaran sebagai salah satu bagian penting dari informasi keuangan yang di perlukan untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan dan laporan realisasi anggaran merupakan laporan realisasi anggaran yang mencatat penggunaan dana secara rinci sesuai dengan alokasi yang telah dianggarkan, sedangkan laporan keuangan memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi keuangan organisasi atau entitas, termasuk pos-pos pendapatan, aset, dan kewajiban.

F. Sistematika Pembahasan

Berisi tentang alur penjabaran skripsi mulai dari bab I pendahuluan hingga bab V penutup. Penulisan sistematika pembahasan dilakukan dengan pendekatan deskriptif naratif, tidak mengikuti format daftar isi.⁹

⁹ Tim penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, hlm. 91

Pada bab I, pendahuluan terdiri latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Pada bab II, kajian Pustaka terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori.

Pada bab III, metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian yang akan dilakukan, kemudian lokasi, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahapan penelitian yang akan dilakukan.

Pada bab IV, penyajian dan analisis data, gambaran objek penelitian, penyajian data dan pembahasan temuan.

Pada bab V atau penutupan berisi kesimpulan dan saran yang berfungsi untuk memperoleh gambaran hasil dari penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Dalam pembahasan sebelumnya terdapat hasil penelitian yang relevan dengan topik yang akan dilakukan, kemudian disusun dalam bentuk tabel ringkasan oleh peneliti untuk memastikan kelancaran penelitian yang sedang dilakukan. Tindakan tersebut untuk menghindari kecurangan dalam penelitian dan penulis akan melakukan telaah karya-karya sebelumnya. Salah satu penelitian terdahulu adalah yang dilakukan oleh:

1. Candira dan Hakim (2019), berjudul “Analisis Perencanaan Penganggaran Keuangan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang”.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Terdapat lima informan yang merupakan anggaran perencanaan di OPD Kepahiang Kabupaten. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif.

Penelitian ini mengindikasikan bahwa perencanaan penganggaran di Badan Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang telah berjalan efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan program kerja pemerintah dianggap sebagai faktor krusial dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan program kerja. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, kemungkinan besar rencana kerja atau program tidak akan terlaksana dengan optimal. Karena itu, penting untuk

menyiapkan dan merencanakan anggaran dengan cermat untuk program kerja agar tidak mengalami kendala pendanaan. Keberhasilan perencanaan anggaran sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor strategis seperti akuntabilitas, transparansi, sistem pengendalian internal, kepemimpinan, dan komitmen organisasi dari perencana anggaran. Hal ini berarti bahwa semakin baik akuntabilitas, transparansi, sistem pengendalian internal, kepemimpinan, dan komitmen organisasi dari seorang perencana anggaran, maka keberhasilan dalam perencanaan anggaran juga akan lebih mudah tercapai.¹⁰

2. Manopo dan Walandouw (2019), berjudul “Analisis Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe”.

Penelitian yang diterapkan oleh penulis adalah penelitian deskriptif, yang bertujuan mengumpulkan informasi yang relevan dengan masalah yang sedang dihadapi. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder sebagai sumber data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam pencapaian sasaran strategis pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib dan akuntabel mencapai 92,22% dari total anggaran yang terealisasi, atau sekitar Rp. 12.950.754.048,25. Terlihat bahwa pencapaian anggaran untuk setiap target rata-rata mencapai 92,22% dengan kategori "sangat berhasil". Oleh

¹⁰ Dedi Candira dan Kahar Hakim “Analisis Perencanaan Penganggaran Keuangan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang” (*Jurnal Governance dan Administrasi Publik*, Universitas Bengkulu), 3, No. 2 (2019), 11-19

karena itu, dalam merencanakan kerja dan anggaran untuk setiap unit kerja di Kabupaten Kepulauan Sangehe, disarankan untuk memanfaatkan secara maksimal fungsi situs web yang sudah dimiliki sebagai sarana untuk berinteraksi dengan masyarakat dan meningkatkan kinerja dalam pengelolaan anggaran belanja daerah secara khusus dan APBD secara umum.¹¹

3. Romenda dan Ningsih (2020), berjudul “Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh”

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, sehingga laporan penelitiannya akan berisi data-data yang dikutip untuk memberikan gambaran pada penyajian laporan.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa semua program dan kegiatan yang disusun oleh SKPD harus mengikuti RPJM yang telah dibuat oleh gubernur. Proses penyusunan anggaran di pemerintah Aceh, seperti yang dijelaskan dalam hasil penelitian, telah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan RPJM yang telah disusun untuk periode tahun 2017-2022.¹²

4. Ramhawati, Dkk (2021), berjudul “Sistem Informasi Manajemen Daerah dan Pengawasan Untuk Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah”

¹¹ Eunike Sofia Manoppo dan Stanley Kho Walandouw “Analisis Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangehe”, (*Jurnal EMBA*, Universitas Sam Ratulangi), 07, No. 4 (2019), 4798-4807

¹² Ananta Yulia Romenda dan Endang Surasetyo Ningsih, “Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh”, (*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Akuntansi*, Universitas Syiah Kuala Lumpur, 05, No. 1 (2020), 50-58

Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang melibatkan metode wawancara terhadap Organisasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Pringsewu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mendukung pencapaian opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan RI, terutama bagi pemerintah Kabupaten Pringsewu, adalah penggunaan teknologi informasi seperti aplikasi SIMDA dan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat.¹³

5. Agung Parmono dan Aminatus Zuhriyyah (2021), berjudul “Pelaporan Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Jember”

Dalam penelitian ini, dilakukan analisis dengan metode deskriptif kualitatif. Dengan pendekatan tersebut, laporan keuangan yang dijadikan simulasi dianalisis secara mendalam dengan mengkaji, memaparkan, menelaah, dan menjelaskan data yang ada untuk mendapatkan gambaran yang akurat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Selain itu, peneliti juga menggunakan triangulasi metode dan sumber data untuk memperkuat hasil analisis.

hasil penelitian, menerapkan konsep entitas ekonomi dan pencatatan akuntansi sederhana pada UMKM telah memberikan manfaat yang positif bagi perkembangan waktu dan masa depannya. UMKM di Kabupaten Jember telah mengalami perkembangan pesat, namun kekurangan dalam

¹³ Yannisa Rahmawati, Dkk “Sistem Informasi Manajemen Daerah Dan Pengawasan Untuk Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah”, (*Jurnal Of Economic and Bussiness Retail*, Institut Teknologi dan Bisnis Diniyyah Lampung), 01, No. 1 (2021), 37-34

penyusunan laporan keuangan sesuai standar (SAK ETAP/ EMKM) menyebabkan kekalahan dalam ajang kreatifitas. Hingga saat ini, laporan keuangan yang disusun oleh UMKM hanya mencakup transaksi uang masuk dan uang keluar, tanpa menyertakan elemen-elemen lain seperti neraca, laporan laba rugi, dan perubahan modal. UMKM di Kabupaten Jember masih membutuhkan bimbingan dalam penyusunan laporan keuangan. Sebagian UMKM masih memiliki pemikiran sederhana bahwa selama masih memiliki modal untuk produksi, dianggap sudah menghasilkan laba.¹⁴

6. Munir Is'adi dan Nur Ika Mauliyah (2022), berjudul “Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel Pada Lembaga Amil Zakat Azka Jember”

Penelitian ini menggunakan metode program kemitraan atau pendampingan untuk membentuk forum diskusi yang menyampaikan materi tentang PSAK 109. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap laporan keuangan yang telah disusun dan disesuaikan dengan PSAK 109, serta revisi laporan keuangan Tahun 2020 dengan bantuan data dari pendamping.

Berdasarkan hasil analisis laporan dan pengelolaan keuangan, ditemukan bahwa LAZ AZKA AL BAITul amien Jember masih memiliki kelemahan dalam penyajian laporan keuangan. Oleh karena itu, dilakukan kegiatan pelatihan dan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan oleh tim selama delapan pertemuan. Kegiatan ini difokuskan

¹⁴ Agung Parmono dan Aminatus Zuhriyyah, “Pelaporan Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Jember”, (*Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Jember), 06, No. 2 (2021), 209-241

pada peningkatan akuntabilitas dalam sistem pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan sesuai standar PSAK 109. Tim juga melakukan dialog dan diskusi dengan pengelola keuangan sebagai mitra pengabdian untuk membantu mereka memahami lebih baik bagaimana menyusun laporan keuangan yang akuntabel.¹⁵

7. Faisal dan Rosmiati (2022), berjudul “Analisis Pengelolaan Aset Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Subang)”.

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang melibatkan pengamatan, wawancara, dan analisis dokumen, dengan fokus pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai lokasi studi.

Berdasarkan hasil menjelaskan bahwa dalam pengelolaan aset daerah, Pemerintah Kabupaten Subang menghadapi sejumlah tantangan, termasuk keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia dalam mengatur aset milik daerah, serta koordinasi dan komunikasi yang belum berjalan dengan baik. Namun, Pemkab Subang tetap berkomitmen untuk memperbaiki kualitas laporannya dengan cara

¹⁵ Munir Is’adi dan Nur Ika Mauliyah “Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel Pada Lembaga Amil Zakat Azka Jember”, (*Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri), 02, No. 2 (2022), 93-18

menyelenggarakan pelatihan teknis bagi pegawai yang bertugas mengelola aset dan secara aktif mengatasi temuan dari Badan Pemeriksa keuangan.¹⁶

8. Nur Ika Mauliyah, Dkk (2023), berjudul “Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember”

Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif. Sumber data pada penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Data primer, yaitu informasi yang dikumpulkan atau diperoleh langsung di lapangan. Informasi yang didapatkan langsung dengan cara observasi dan wawancara pada UPT Pengelolaan penapatan daerah jember dan SAMSAT Jember. Data sekunder, atau informasi yang dikumpulkan dari karya tulis lainnya. Informasi ini merupakan jenis informasi yang dikumpulkan melalui berbagai jurnal dan buku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan PKB di UPT PDD Jember dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya-upaya yang dilakukan UPT PPD Jember seperti, sosialisasi di kecamatan/kelurahan, sosialisasi tertib pengesahan STNK tahunan dan tertib berlalu lintas, adanya layanan unggulan, serta adanya penagihan melalui surat-surat perpajakan.¹⁷

¹⁶ Anjes Faresh Faisal dan Mia Rosmiati “Analisis Pengelolaan Aset Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Subang)”, (*Jurnal Indonesian Accounting Research*, Politeknik Negeri Bandung), 02, No. 02 (2022), 164-173

¹⁷ Nur Ika Mauliyah, Dkk “Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember” (*Jurnal Bisnis Manajemen*, lapad.id), 01, No. 1 (2023), 95-108

9. Ana Pratiwi, Dkk (2022), berjudul “Pengaruh Pengungkapan *Sustainability Report* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Di Indonesia”

Pada jenis penelitian ini ialah kuantitatif dengan menggunakan metode dokumentasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara simultan pengungkapan *sustainability report* meliputi aspek kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diproksikan dengan rasio profitabilitas menggunakan *Return On Equity* (ROE). Namun, secara parsial hanya kinerja ekonomi yang menunjukkan hasil pengaruh signifikan. Sedangkan kinerja lingkungan dan sosial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diproksikan dengan rasio profitabilitas menggunakan *Return on Equity* (ROE).¹⁸

10. Ana Pratiwi (2022), berjudul “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Pada Pemerintahan Desa Di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember”

Penelitian ini adalah studi kuantitatif yang dilaksanakan melalui riset lapangan. Populasi studi mencakup seluruh anggota perangkat desa di Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, berjumlah 40 orang. Penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh, artinya semua anggota populasi dijadikan sampel, sesuai dengan Sumarni dan Wahyuni (2018).

¹⁸ Ana Pratiwi, Dkk, “Pengaruh Pengungkapan *Sustainability Report* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Di Indonesia”, (*Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis*, Politeknik Negeri Jember), 02, No. 1 (2022), 60-71

Untuk mengumpulkan data, penelitian ini mengandalkan distribusi kuesioner kepada perangkat desa di Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. Data primer yang dikumpulkan berasal dari jawaban kuesioner yang diberikan kepada 40 pegawai desa di wilayah studi.

Temuan dari studi ini mengindikasikan bahwa pengguna Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan menemukan kemudahan dalam mengelola dan melaporkan keuangan. Secara umum, pengguna merasakan keuntungan yang signifikan dari SIMDA Keuangan, yang diantaranya termasuk penyediaan informasi yang akurat dan tepat waktu, keandalan data, serta kemudahan dalam membandingkan data keuangan antardesa, kecamatan, hingga kabupaten. Hal ini membantu mereka secara efektif dalam menyusun laporan penggunaan dan pengelolaan keuangan desa.¹⁹

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

| No. | Nama | Persamaan | Perbedaan |
|-----|----------------|--|--|
| 1 | Candira (2019) | Penelitian ini sama-sama membahas tentang penganggaran keuangan. | Penelitian ini membahas mengenai perencanaan penganggaran keuangan di Dinas Pekerjaan Umum. Sedangkan peneliti fokus pada penganggaran, penatausahaan, dan akuntansi pada laporan keuangan |
| 2 | Manopo (2019) | Penelitian ini sama-sama membahas tentang penganggaran | Penelitian ini membahas mengenai rencana kerja anggaran pada kepulauan sangihe. |

¹⁹ Ana Pratiwi, "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember" (*Jurnal Orientasi Bisnis dan Entrepreneurship*, archive.org), 03, No. 1 (2022), 1-9

| No. | Nama | Persamaan | Perbedaan |
|-----|-------------------------|--|--|
| | | keuangan. | Sedangkan peneliti fokus pada penganggaran, penatausahaan, dan akuntansi. |
| 3 | Romenda (2020) | Penelitian ini sama-sama membahas tentang penganggaran keuangan. | Penelitian ini membahas penerapan anggaran berbasis kinerja keuangan daerah Aceh. Sedangkan peneliti fokus pada penganggaran, penatausahaan, dan akuntansi. |
| 4 | Ramhawati (2021) | Penelitian ini sama-sama membahas tentang laporan keuangan | Penelitian ini membahas sistem informasi manajemen daerah. Sedangkan peneliti fokus pada penganggaran, penatausahaan, an akuntansi. |
| 5 | Agung Parmono (2021) | Penelitian ini sama-sama membahas tentang laporan keuangan. | Penelitian ini membahas pelaporan keuangan pada usaha umkm di Kabupaten Jember. Sedangkan peneliti fokus pada penganggaran, penatausahaan, dan akuntansi. |
| 6 | Munir Is' adi (2022) | Penelitian ini sama-sama membahas pengelolaan keuangan. | Penelitian ini membahas pengelolaan keuangan pada Lembaga amil zakat azka di Jember. Sedangkan peneliti fokus pada penganggaran, penatausahaan, dan akuntansi. |
| 7 | Faisal (2022) | Penelitian ini sama-sama membahas laporan keuangan. | Penelitian ini membahas pengelolaan aset daerah di Kabupaten Subang. Sedangkan peneliti fokus pada penganggaran, penatausahaan, dan akuntansi. |
| 8 | Nur Ika Mauliyah (2023) | Penelitian ini sama-sama membahas akuntansi. | Penelitian ini membahas optimalisasi pajak kendaran bermotor daerah jember. Sedangkan peneliti fokus pada penganggaran, penatausahaan, dan akuntansi. |

| No. | Nama | Persamaan | Perbedaan |
|-----|--------------------|---|--|
| 9 | Ana Pratiwi (2022) | Penelitian ini sama-sama membahas keuangan. | Penelitian ini membahas pengaruh pengungkapan kinerja keuangan perbankan di Indonesia. Sedangkan peneliti fokus pada penganggaran, penatausahaan, dan akuntansi. |
| 10 | Ana Pratiwi (2022) | Penelitian ini sama-sama membahas laporan keuangan. | Penelitian ini membahas penerapan sistem informasi manajemen di Kecamatan. Sedangkan peneliti fokus pada penganggaran, penatausahaan, dan akuntansi. |

Sumber: Data diolah oleh peneliti tahun 2024

B. Kajian Teori

1. PSAK No. 1

PSAK No.1 menegaskan semua persyaratan yang harus dipenuhi saat menyajikan laporan keuangan untuk keperluan umum, dan menjadi landasan bagi persyaratan. PSAK No.1 bertujuan memastikan bahwa informasi yang disajikan memungkinkan perbandingan dengan laporan keuangan entitas pada periode sebelumnya. Kebijakan tersebut menetapkan panduan umum dalam penyajian laporan keuangan, termasuk aspek-aspek seperti penyajian yang wajar, kepatuhan terhadap standar akuntansi, kelangsungan usaha (*going concern*), dasar akrual akuntansi, materialitas, agregasi, frekuensi pelaporan, informasi yang membandingkan, dan konsistensi penyajian.

Menurut PSAK No. 1, laporan keuangan meliputi laporan posisi keuangan, laba rugi komprehensif, perubahan nilai, arus kas, catatan atas

laporan keuangan, dan posisi anggaran pada awal periode. Laporan keuangan membantu dalam pengambilan keputusan untuk memastikan bahwasanya telah disusun sesuai dengan PSAK No. 1. Para pemakai laporan keuangan tersebut termasuk investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok, kreditor usaha, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat.²⁰

2. Penganggaran

Pengelolaan keuangan Desa adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diatur dalam manajemen keuangan Desa, dievaluasi dengan uang dalam satu tahun anggaran. Kegiatan penyusunan mencakup perancangan perencanaan strategis keuangan untuk periode tertentu seperti RPJMD dan RKPD. Sedangkan kegiatan pengorganisasian melibatkan pengaturan anggaran Desa seperti penerimaan, belanja/pengeluaran, dan pendapatan. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dilakukan berdasarkan prinsip efektivitas dan efisiensi yang harus dijalankan oleh aparat pelaksana. Dalam pengelolaan keuangan Desa, akuntabilitas diperlukan, yang mencakup penerbitan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa secara rutin selama satu

²⁰ Wantah, "Analisis Penerapan PSAK No. 1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Pada Perum Bulog Divre Sulut dan Gorontalo", (*Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Universitas Sam Ratulangi Manado), 15, No. 4, 74-88

tahun anggaran.²¹ faktor-faktor yang mempengaruhi penganggaran antara lain:

a. Transparansi

Pemerintah Desa mengutamakan keterbukaan kepada masyarakat sehubungan dengan program yang akan direalisasikan untuk perbaikan desa.

b. Akuntabilitas

Pemerintah Desa bertanggungjawab atas kegiatan yang harus dilakukan dalam mengelola kemajuan dan kendala di pemerintahan. Pertanggungjawaban yang dimaksud yaitu masalah finansial.

c. Partisipasi

Pemerintah Desa membuka peluang bagi masyarakat agar ikut terlibat dan berperan aktif dalam proses pembangunan Desa. Hal tersebut sesuai dengan prinsip daerah yang memfokuskan peran masyarakat Desa.

d. Penyelenggaraan

Pemerintah melibatkan masyarakat dalam penyusunan perencanaan anggaran Desa.

e. Pemerintah menanggapi aspirasi yang berkembang di Masyarakat

Pemerintah Desa tanggap pada permasalahan masyarakat dan memenuhi kebutuhan serta keinginan masyarakat Desa.

²¹ Dr. Riant Nugroho dan Firre An Suprpto, SAP., M.Pd, Manajemen Keuangan Desa Bagian 2: Perencanaan Keuangan Desa, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo), 2021.

f. Professional

Kemampuan yang wajib dimiliki pegawai Desa sesuai dengan jabatannya.²²

3. Penatausahaan

Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa menyatakan bahwa penyelenggaraan pendapatan dan pengeluaran harus dilaksanakan dengan menggunakan: buku kas umum, buku Cadangan biaya, dan buku bank. Buku kas umum digunakan untuk mencatat seluruh penerimaan berupa uang tunai pada bendahara Desa. Buku cadangan simpanan kas masuk ke rekening negara. Buku bank digunakan untuk mencatat penukaran simpanan ke rekening kas Desa dan Penarikan dari rekening kas Desa di bank. Pengelola Keuangan Desa, khususnya Bendahara wajib menyusun beberapa hal yang paling banyak mengatur di dalam agar kegiatan organisasi berlangsung dengan efisien. Dalam menjalankan penatausahaan, bendahara menerima pendapatan dan bendahara mempunyai peranan dan tugas yang sangat penting dalam melaksanakan kewajiban di lingkungan kerja. Bendahara mempunyai tugas melaksanakan pembukuan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran yang diterimanya, menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pejabat, menilai dan menganalisis laporan pertanggungjawaban.

²² Arga Mulya. "Prinsip-Prinsip Penganggaran Desa", diakses pada 17 Oktober 2023, pukul 12.08). <https://argamulya.desa.id/berita/detail/prinsipprinsip-penganggaran-desa>

Sedangkan bendahara memiliki tugas mengawasi persediaan kas, penerimaan, dan menyimpan pembukuan.²³

4. Akuntansi

Akuntansi adalah proses cara membedakan, mencatat, mengukur, mengklasifikasikan dan merekapitulasi. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan tolak ukur yang dilaksanakan dalam rangka menyelaraskan anggaran pemerintah. Sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa pemerintahan harus mandiri dalam mengawasi peraturan dan sumber daya alam yang dimiliki oleh Desa, termasuk perencanaan kemajuan Desa dan penyelenggaraan anggaran. Hal ini dapat ditemukan dalam perhitungan siklus akuntansi, pelaksanaan, dan pengorganisasiannya, serta tanggungjawab.²⁴

Menurut Paul Gradi, akuntansi adalah organisasi yang secara sistematis, terpercaya, dalam melakukan pencatatan, mengklasifikasi, memproses, menganalisis, dan menginterpretasikan keseluruhan transaksi, serta membuat laporan keuangan yang terjadi di dalam operasional perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban.²⁵

5. Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah komponen terpenting dalam membentuk suatu akuntabilitas sektor publik serta menjadi pengukur kinerja dalam

²³ Kementerian keuangan “Penatausahaan Keuangan Daerah”, diakses pada tanggal 04 Desember 2023, pada jam 20.33, <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5753>

²⁴ Dr. Izza Mafruhah, SE, M.Si dkk, Data dan Informasi Manfaat Dana Desa di Provinsi Jawa Tengah, (Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi), 2018.

²⁵ Zaki, “Pengertian Akuntansi Desa dan Dasar Hukumnya”, diakses pada tanggal 11 Oktober 2021, pada pukul 12.45, <https://guruakuntansi.co.id/akuntansi-des/>

bidang keuangan bagi pemerintah daerah. Untuk segi eksternal, laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun tersebut berisikan informasi keuangan daerah yang dipakai sebagai acuan peninjauan dalam mengambil kebijakan ekonomi, sosial, dan politik. Sedangkan untuk pihak eksternal, laporan keuangan dipakai menjadi alat dalam menilai kinerja. Dalam Menyusun suatu pelaporan keuangan sektor publik yang tepat diperlukan sistem informasi akuntansi keuangan publik yang baik, dan sangat diharapkan proses pengelolaan transaksinya pun akan lebih baik juga sehingga dapat menyajikan informasi keuangan yang tepat.²⁶

Tujuan laporan keuangan yaitu untuk menyajikan laporan mengenai posisi keuangan, pelaksanaan dan perubahan posisi anggaran suatu perusahaan yang berguna bagi semua pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Sesuai dengan pedoman yang berlaku di Indonesia, laporan keuangan terdiri dari lembar penyediaan, keuntungan dan kerugian serta perubahan modal, namun ada perusahaan yang menyiapkan laporan dengan menggunakan sumber dan penggunaan cadangan karena dengan laporan tersebut akan diketahui bagaimana Perusahaan mengawasi/mengontrol cadangan yang dimilikinya.²⁷ Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan

²⁶ Fadilatul Jannah dan Yedida Cahya A.P, "Analisa Laporan Keuangan Sektor Publik dan Elemennya untuk Penilaian Akuntabilitas serta Kinerja Pemerintah Desa", (*Jurnal mahasiswa akuntansi*, Universitas Tulungagung), 2, No. 1 (2022), 26-33

²⁷ Ibid.²

laporan secara komparatif. Laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi.²⁸



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

²⁸ Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 2.a Tahun 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, Dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.²⁹ Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dengan jenis permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan pola jenis penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah sifat penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat yang diteliti secara sistematis.³⁰

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. Lokasi ini dirasa sangat menarik untuk diteliti karena dianggap perlu untuk mengetahui penganggaran, penatausahaan, dan akuntansi pada laporan keuangan.

Alasan peneliti memilih tempat ini karena pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik serta dapat memahami bagaimana proses penatausahaan di tingkat Desa.

²⁹ Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021). 137

³⁰ Syafrida Hafni Sahur, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), 6

C. Subyek Penelitian

Pada penelitian ini, pemilihan subyek penelitian menggunakan *purposive sampling*. sedangkan yang dimaksud dengan *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur untuk dipilih menjadi anggota sampel.³¹ Maksudnya narasumber tersebut dianggap yang paling tahu mengenai apa yang peneliti inginkan sehingga memudahkan peneliti untuk menjelajahi obyek/situasi yang diteliti. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah:

1. Bapak Badriyo, S.Pd, alasan peneliti memilih narasumber tersebut karena menjabat sebagai sekretaris Desa.
2. Bapak Feri Irawan, alasan peneliti memilih narasumber tersebut karena selaku bendahara Desa.
3. Bapak Wawan Budi Setyo, S.sos, alasan peneliti memilih narasumber tersebut karena menjabat sebagai kaur perencanaan Desa.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.³² Dengan adanya teknik tersebut, peneliti tidak akan mendapatkan data yang tidak

³¹ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), 218

³² Prof. Dr. Sugiyono, 224

memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan beberapa penelitian yaitu:

1. Observasi

Observasi mengamati suatu pertanyaan secara spesifik pada investigasi, serta mencatat secara efisien permasalahan yang akan diselidiki. Beberapa informasi yang diperoleh dari observasi dapat berupa tempat (ruang), seruan pertunjukan, aktivitas, objek, aktivitas, kejadian atau kejadian, waktu dan sentimen. Maksudnya peneliti melakukan observasi adalah untuk memberikan gambaran yang masuk akal tentang perilaku atau peristiwa, untuk menjawab pertanyaan, memberikan bantuan untuk memahami perilaku manusia, dan sebagai penilaian, yaitu melakukan estimasi dari sudut tertentu dan memberikan masukan terhadap estimasi tersebut.³³

Penelitian ini peneliti dilaksanakan secara langsung di Kantor Desa Condro. Alasan peneliti menggunakan observasi secara langsung karena peneliti lebih mudah mendapatkan data. Observasi digunakan untuk mengamati obyek secara langsung tentang Analisis Penganggaran, Penatausahaan, dan Akuntansi Pada Laporan Keuangan (Studi Kasus Kantor Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang).

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu prosedur pengumpulan informasi dengan cara melakukan wacana atau diskusi yang terkoordinasi antara

³³ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 51.

peneliti dengan individu yang ingin ditemui dan berkaitan dengan pokok permasalahan. Pertemuan juga dapat diartikan sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar pikiran dan konsep melalui prosedur tanya jawab yang pada akhirnya menghasilkan perkembangan atau makna seputar subyek.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu informasi mengenai faktor-faktor yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar harian, majalah, ukiran, notulen rapat, catatan, rencana dan sebagainya. Strategi dokumentasinya yaitu mengamati benda mati, bukan benda hidup. Analisis menggunakan daftar periksa untuk mencari faktor-faktor yang telah ditentukan sebelumnya.

E. Analisis Data

Adapun tahapan-tahapan peneliti dalam menganalisis data penelitian adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Dalam suatu situasi sosial tertentu, peneliti dalam mereduksi data mungkin akan memfokuskan pada orang miskin, pekerjaan sehari-hari yang kerjanya, dan rumah tinggalnya. Dalam bidang manajemen, dalam reduksi data mungkin peneliti akan memfokuskan pada bidang pengawasan, dengan melihat perilaku orang-orang yang jadi pengawas eole kerja, tempat kerja, interaksi antara pengawas dengan yang diawasi serta hasil pengawasan.³⁴

2. Penyajian Data

³⁴ Prof. Dr. Sugiyono, 247

Dokumentasi informasi berkenaan dengan hal-hal atau variabel-variabel di dalamnya. Dalam penyelidikan subjektif, pengenalan informasi dapat berupa kumpulan data yang terorganisir dan memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan. Pengenalan informasi dilakukan secara berurutan untuk melihat gambaran umum atau bagian-bagian tertentu dari gambaran umum.

3. Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek.³⁵

F. Keabsahan Data

Keabsahan data menjelaskan bagaimana usaha-usaha yang akan dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data temuan di lapangan. Untuk mendapatkan penemuan yang signifikan, penting untuk melihat validitasnya dengan menggunakan strategi legitimasi informasi seperti memperluas kedekatan analisis di lapangan, persepsi yang lebih mendalam, triangulasi informasi (memanfaatkan beberapa sumber, strategi, analisis, spekulasi), dialog antar rekan kerja, pemeriksaan kasus orang lain, mengikuti kewajaran kejadian, dan mengecek anggota (*member check*).³⁶ Dalam penelitian kualitatif, ada empat teknik mencapai keabsahan data, yaitu:

1. Kredibilitas meliputi latihan-latihan, memperluas strategi persepsi, melaksanakan persepsi tanpa henti, triangulasi berupa pengumpulan informasi dari lebih dari satu sumber, peer questioning dengan cara

³⁵ Prof. Dr. Sugiyono, 253

³⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, hlm 48.

meneliti menyelidiki masalah dengan orang lain, member-checking artinya mengulangi pada akhir setiap pertemuan sehingga pemeriksaan subjek.

2. Transferabilitas, maksudnya yaitu, sejauh mana hasil penelitian ini dapat diterapkan atau disejajarkan pada kasus daerah lain.
3. *Auditabilitas* dan *Dependabilitas* (reabilitas) merupakan konsistensi, atau kesamaan hasil yang diulang oleh peneliti lainnya.
4. Konfirmabilitas dan triangulasi (menggunakan beberapan sumber, metode, peneliti, teori).³⁷

G. Tahap-tahap Penelitian

Pada tahapan penelitian yang akan peneliti lakukan berkaitan dengan proses pelaksanaan dalam penelitian. Beberapa tahapan dalam penelitian kualitatif sebagai berikut.

1. Pra lapangan, meliputi:
 - a. Menyusun rancangan yang akan dilakukan oleh peneliti
 - b. Memilih lapangan/obyek
 - c. Mengurus perijinan tempat
 - d. Menjajaki dan menilai keadaan
 - e. Memilh dan memanfaatkan informan
 - f. Menyiapkan instrument
 - g. Persoalan etika dalam lapangan
2. Lapangan
 - a. Memahami dan memasuki lapangan
 - b. Pengumpulan data.

³⁷ Suwardi Endaswara, *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 112.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Desa Condro

Pada penelitian ini dilakukan di Pada Kantor Desa Condro dan mengambil data dari kantor Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. Tujuan penelitian tersebut yaitu mengambil data di kantor Desa Condro untuk mengetahui bagaimana proses penganggaran, penatausahaan, dan akuntansi pada laporan keuangan di kantor Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. Desa Condro merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. Desa Condro tergolong dalam klasifikasi desa perkotaan dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang cepat bila dibandingkan dengan sembilan desa lain di kecamatan Pasirian.³⁸

2. Kondisi Geografis

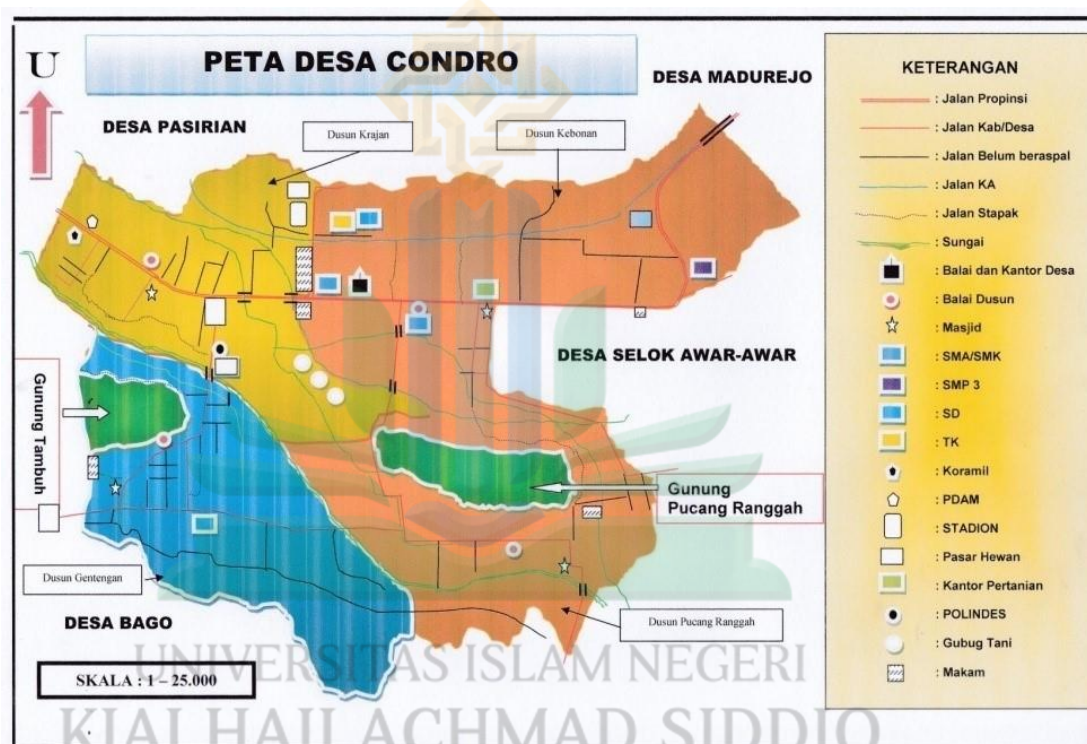
Desa Condro merupakan salah satu Desa di wilayah Kecamatan Pasirian dan termasuk didaerah dataran tinggi dengan suhu kurang lebih 26° dengan curah hujan rata-rata 1.978 mm tinggi tempat dari permukaan laut 119 mdl, Luas desa: 303,935 Ha. dengan batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Pasirian
- b. Sebelah Timur : Desa Selok Awar-awar
- c. Sebelah Selatan : Desa Bago
- d. Sebelah Barat : Desa Pasirian

³⁸ Wawancara dengan Bapak Badriyo Susanto, S. Pd sebagai sekretaris di Kantor Desa Condro, 03 November 2023

Posisi tata letak Desa Condro dengan jarak ke Ibukota Kecamatan sekitar 2 Km dan Ke Ibukota Kabupaten sekitar 18 Km.

Gambar 4.1
Peta Desa Condro



Sumber: *Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang*

3. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk desa Condro sebanyak 4.786 jiwa yang tersebar di 4 Dusun, RW 9 dan 28 RT. Dari jumlah tersebut, terdiri dari laki-laki 2.372 jiwa dan perempuan 2.414 jiwa dengan tingkat pertumbuhan rata-rata selama 6 (enam) tahun terakhir 2 %, dengan tingkat kepadatan sebesar 2.393 jiwa/km². Perkembangan jumlah penduduk di Desa Condro Dalam 6 (enam) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Perkembangan Kependudukan
Tahun 2015-2020

| Uraian | Satuan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Luas Wilayah | Ha | 303,935 | 303,935 | 303,935 | 303,935 | 303,935 | 303,935 |
| Jumlah Penduduk | Jiwa | 4775 | 4766 | 4782 | 4797 | 4812 | 4848 |
| Jumlah Laki-Laki | Jiwa | 2341 | 2367 | 2375 | 2379 | 2387 | 2398 |
| Jumlah Perempuan | Jiwa | 2434 | 2399 | 2407 | 2418 | 2425 | 2450 |
| Jumlah A-RTM | Orang | 402 | 336 | 336 | 265 | 265 | 265 |
| Pertumbuhan Penduduk | % | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kelahiran Penduduk | Jiwa | 24 | 17 | 28 | 25 | 23 | 9 |
| Kematian Penduduk | Jiwa | 13 | 24 | 16 | 15 | 14 | 5 |
| Kepadatan Penduduk | Jiwa/Ha | 15,7 | 15,7 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 16 |

Sumber data: Sensus Penduduk 2020

Salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap perkembangan jumlah penduduk adalah keberhasilan program keluarga berencana di Desa Condro. Jika dilihat dari perkembangan jumlah KB aktif di Desa Condro pada tahun 2015-2020 mengalami penurunan, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Perkembangan Jumlah Peserta KB dan PUS
Tahun 2015-2019

| Uraian | Satuan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|--------|------|------|------|------|------|
| PUS | Pasang | 687 | 841 | 780 | 687 | 779 |
| Peserta KB Aktif | Orang | 630 | 704 | 582 | 628 | 642 |
| Presentase | % | 92% | 84% | 75% | 91% | 82% |

Sumber data: Sensus Penduduk 2020

Data sebaran penduduk Desa Condoro yang mendiami wilayah Dusun/RW/RT dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Data Sebaran Penduduk Desa Per Wilayah

| 1 | Wilayah | Penduduk | | Jumlah | Keterangan |
|---------------------|---------|----------|-----|--------|------------|
| | | Lk. | Pr. | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
| Dsn Krajan | | | | | |
| RW. 001 | | | | | |
| 1. | RT. 001 | 137 | 146 | 283 | |
| 2. | RT. 002 | 145 | 154 | 299 | |
| 3. | RT. 003 | 138 | 132 | 270 | |
| RW. 002 | | | | | |
| 1. | RT. 004 | 106 | 96 | 202 | |
| 2. | RT. 005 | 67 | 73 | 140 | |
| 3. | RT. 006 | 78 | 69 | 147 | |
| RW. 009 | | | | | |
| 1. | RT. 007 | 26 | 37 | 63 | |
| 2. | RT. 008 | 59 | 73 | 132 | |
| 3. | RT. 009 | 51 | 48 | 99 | |
| Dsn. Kebonan | | | | | |
| RW. 003 | | | | | |
| 1. | RT. 001 | 96 | 88 | 184 | |
| 2. | RT. 002 | 99 | 89 | 188 | |
| 3. | RT. 003 | 87 | 84 | 171 | |
| RW. 004 | | | | | |
| 1. | RT. 004 | 74 | 86 | 160 | |
| 2. | RT. 005 | 79 | 78 | 157 | |

| | Wilayah | Penduduk | | Jumlah | Keterangan |
|----------------------------|---------|----------|-----|--------|------------|
| | | Lk. | Pr. | | |
| 3. | RT. 006 | 81 | 87 | 168 | |
| RW. 005 | | | | | |
| 1. | RT. 007 | 80 | 80 | 160 | |
| 2. | RT. 008 | 130 | 133 | 263 | |
| 3. | RT. 009 | 7 | 77 | 168 | |
| Dsn. Gentengan | | | | | |
| RW. 006 | | | | | |
| 1. | RT. 001 | 119 | 123 | 242 | |
| 2. | RT. 002 | 116 | 110 | 226 | |
| 3. | RT. 003 | 134 | 138 | 272 | |
| RW. 007 | | | | | |
| 1. | RT. 004 | 88 | 102 | 190 | |
| 2. | RT. 005 | 109 | 128 | 237 | |
| 3. | RT. 006 | 99 | 107 | 206 | |
| 4. | RT. 007 | 72 | 94 | 166 | |
| Dsn. Pucang Ranggah | | | | | |
| RW. 008 | | | | | |
| 1. | RT. 001 | 106 | 93 | 199 | |
| 2. | RT. 002 | 98 | 99 | 197 | |
| 3. | RT. 003 | 50 | 45 | 95 | |

Sumber data: Sensus Penduduk 2020

Wilayah Desa Condoro terdiri dari 4 Dusun, 9 RW dan 28 RT, yang merupakan wilayah administrasi desa. Data wilayah administrasi desa dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.4
Data Wilayah Administrasi Desa Condoro

| 1 | Wilayah | Nama | Keterangan |
|-------------------|---------|-------------------------------|---------------------|
| 2 | 3 | 4 | |
| Dsn Krajan | | Setyo Supriyatno | Kepala Dusun |
| RW. 001 | | Subadiyo | Ketua RW |
| 1. | RT. 001 | Satuwi | Ketua RT |
| 2. | RT. 002 | Bati Hariyono | Ketua RT |
| 3. | RT. 003 | Suparto | Ketua RT |
| RW. 002 | | Teguh Hari W. | Ketua RW |
| 1. | RT. 004 | Hariyono Prayogi | Ketua RT |
| 2. | RT. 005 | Suparto | Ketua RT |
| 3. | RT. 006 | Ahmad Sufendi | Ketua RT |
| RW. 009 | | A.H. Trisunu Hadianoro | Ketua RW |
| 1. | RT. 007 | Slamet | Ketua RT |

| | Wilayah | Nama | Keterangan |
|----------------------------|----------------|----------------------------|---------------------|
| 2. | RT. 008 | Joko Asmono | Plt. Ketua RT |
| 3. | RT. 009 | Dhony Vian M. | Ketua RT |
| Dsn. Kebonan | | Mujianto | Kepala Dusun |
| RW.003 | | Iwan Hadi | Ketua RW |
| 1. | RT. 001 | Bawon Basuki | Ketua RT |
| 2. | RT. 002 | Jajuk Supriyadi | Ketua RT |
| 3. | RT. 003 | Atim Cahyadi | Ketua RT |
| RW. 004 | | Siyono | Ketua RW |
| 1. | RT. 004 | M. Arifin | Ketua RT |
| 2. | RT. 005 | Paeri | Ketua RT |
| 3. | RT. 006 | Didik Suhartono | Ketua RT |
| RW. 005 | | Margo | Ketua RW |
| 1. | RT. 007 | Rumat | Ketua RT |
| 2. | RT. 008 | Saribowo | Ketua RT |
| 3. | RT. 009 | Ahmad Zailani | Ketua RT |
| Dsn. Gentengan | | Yakut | Kepala Dusun |
| RW. 006 | | Edi Suyanto | Ketua RW |
| 1. | RT. 001 | Nanang Heri P. | Ketua RT |
| 2. | RT. 002 | Tulus | Ketua RT |
| 3. | RT. 003 | Misgianto | Ketua RT |
| RW. 007 | | Kabit | Ketua RW |
| 1. | RT. 004 | M. Masin | Ketua RT |
| 2. | RT. 005 | M. Khoirul | Ketua RT |
| 3. | RT. 006 | Busar | Ketua RT |
| 4. | RT. 007 | Moh. Ali | Ketua RT |
| Dsn. Pucang Ranggah | | Sunam | Kepala Dusun |
| RW. 008 | | Achmad Zainul Hasan | Ketua RW |
| 1. | RT. 001 | Tiwar Nawari | Ketua RT |
| 2. | RT. 002 | Zainul Hasan | Ketua RT |
| 3. | RT. 003 | Sutrisno | Ketua RT |

Sumber data: Kantor Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang

4. Visi dan Misi Desa Condro

a. Visi :

Visi merupakan nilai organisasi untuk mengenal keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan suatu gambaran tentang keadaan di masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dan dianut oleh seluruh

komponen stakeholder. Visi dapat dikatakan tujuan yang mengarah dan mendorong semua stakeholder (pemerintah dan non pemerintah) untuk berkontribusi pada pencapaian visi. Visi dirancang dalam jangkauan 6 tahun kedepan atau lebih dan memberikan inspirasi, arah serta posisi tawar desa di masa depan dalam kancah pergaulan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan kondisi masyarakat desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang saat ini, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi di masa depan, serta dengan mempertimbangkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan serta pemerintah desa, maka dalam pelaksanaan periode pembangunan pemerintah desa Condro tahun 2020-2026, dicanangkan visi pembangunan Desa Condro, adalah sebagai berikut:

**“KEBERSAMAAN MENUJU DESA SIDRO YANG AMAN,
DAMAI, SEJAHTERA, DAN BERMARTABAT”**

b. Misi :

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan yang nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Desa Condro untuk 6 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1) Bidang Pemerintahan

- a) Meningkatkan kualitas kerja.
- b) Memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara cepat/ berbasis online kepada Masyarakat.
- c) Meningkatkan sinergitas Perangkat desa, mitra kerja BPD, semua unsur lembaga masyarakat, Tomas, Toga, Toda, dan masyarakat.
- d) Mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- e) Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD).
- f) Melaksanakan Sistem Keuangan Desa yang transparan dan akuntabel.
- g) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi keluarga melalui pemberdayaan masyarakat.

2) Bidang Keamanan

- a) Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada warga Masyarakat tentang sistem keamanan swakarsa (siskam swakarsa).
- b) Menumbuhkan inovasi masyarakat untuk mengamankan harta bergerak (Hewan ternak dan Ranmor) untuk cegah tangkal segala bentuk gangguan KAMTIBMAS.
- c) Memberikan sosialisasi secara rutin pada kegiatan rutin RT/RW antisipasi kenakalan remaja usia sekolah dari

Kriminalitas/Narkoba kerjasama dengan BNN Kabupaten Lumajang.

- d) Sosialisasi UU KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).
- e) Mewujudkan rasa aman, tentram dan damai bagi semua lapisan masyarakat Desa Condro yang mantab dengan melibatkan unsur Perangkat Desa, Babinsa, Babin Kamtibmas, Linmas, SKD, dan masyarakat.

3) Bidang Pembangunan

- a) Melaksanakan musyawarah rencana pembangunan pada tingkat dusun dan desa pada tiap tahun sehingga pelaksanaan pembangunan tepat sasaran dengan mengutamakan skala prioritas.

- b) Penuntasan rabat beton gang dan jalan desa/ Jitut.

- c) Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur secara rutin.

- d) Merawat, meningkatkan pembangunan saluran irigasi dan membenahi sistem pola tanam dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.

- e) Rehabilitasi dan pembangunan gedung PAUD, Arsip, Perpustakaan, KIM, Sekretariat Linmas/ SKD.

- f) Percepatan penyelesaian pembangunan program unggulan Desa “Wisata Tambuh Raya Idaman” untuk meningkatkan PAD yang ditujukan untuk kemakmuran masyarakat Desa Condro dengan

dikelola oleh BUMDes/ Pokdarwis secara profesional dan transparan dengan tahapan sesuai masterplan.

4) Bidang Kesehatan

- a) Rehab gedung dan penambahan lokal Polindes terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa.
- b) Pelayanan ambulans desa siaga 24 jam (non stop).
- c) Sosialisasi, Penimbangan dan Pemberian makanan tambahan gizi bagi balita dan lansia.
- d) Sosialisasi pemahaman tentang STUNTING kepada calon ayah dan ibu, ibu hamil dan pemberian gizi pada balita.
- e) Mendorong untuk mewujudkan lingkungan sehat bagi masyarakat.

5) Bidang Pendidikan

Mendukung untuk meningkatkan kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif, dan bermoral melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berkeadilan.³⁹

c. Tujuan

Mengacu pada pernyataan visi dan misi dengan didasarkan pada isu-isu, permasalahan dan potensi yang ada di desa Condro maka tujuan yang ingin dicapai dalam 6 tahun ke depan adalah:

- 1) Terwujudnya masyarakat yang aman dan nyaman sehingga pencurian hewan ternak dan ranmor tidak ada lagi.

³⁹ Wawancara dengan Bapak Badriyo Susanto, S.Pd sebagai sekretaris di Kantor Desa Condro, 03 November 2023

- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang lebih baik.
- 3) Mengenalkan bidang pariwisata yang ada di desa Condro kepada masyarakat luas baik lokal maupun nasional.
- 4) Menyelesaikan pembangunan-pembangunan fisik yang belum selesai sehingga masyarakat nantinya lebih mudah dalam melakukan setiap aktivitas karena ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai.

d. Sasaran

Sasaran umum yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari pembangunan desa Condro dalam kurun waktu 6 tahun kedepan dimana atas keberhasilan target ini diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, yaitu:

- 1) Meningkatnya peran tenaga kependidikan baik formal maupun informal.
- 2) Semakin berkualitas taraf hidup masyarakat desa dan dapat diandalkan dalam kancah persaingan global.

e. Program Kegiatan

Dari rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, Program Kegiatan pembangunan Desa Condro. tahun 2020-2026 yaitu:

- 1) Mewujudkan masyarakat yang cerdas secara emosional maupun spiritual, berpengetahuan, berpendidikan dan berakhlaq mulia sesuai tuntunan agamanya.

- 2) Mewujudkan taraf kehidupan masyarakat desa yang berkualitas sehingga mampu bersaing dalam kancah persaingan global.
- 3) Mengenalkan bidang pariwisata desa khususnya wisata alam kepada masyarakat lokal maupun nasional.

f. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Dalam rangka melaksanakan strategi pembangunan sebagaimana tersebut diatas, dirumuskan arah kebijakan pembangunan desa jangka waktu 6 tahun kedepan, sebagai berikut:

- 1) Mendorong maju dan berkembangnya pembangunan sumber daya manusia di desa melalui lembaga pendidikan formal maupun informal.
- 2) Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan masyarakat desa melalui lembaga pendidikan keagamaan;

g. Arah Kebijakan Keuangan Desa

Desa memfasilitasi pencermatan Pendapatan Asli Desa untuk menyusun arah kebijakan keuangan Desa. Perkiraan Pendapatan Asli Desa minimal sama dengan tahun sebelumnya sesuai dengan kondisi keuangan Desa. Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari Daerah tentang: pagu indikatif Desa; dan rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa. Data dan informasi, diterima Kepala Desa dari Daerah paling lambat bulan Juli.

h. Program dan Kegiatan Indikatif

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan pembangunan di desa untuk mencapai tujuan dan sasaran serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat. Dengan demikian program yang ada didalam RPJM Desa ini perlu untuk dijabarkan dan dikembangkan menjadi program dan rencana aksi nyata melalui RKP Desa dan APB Desa sesuai bidang kewenangan desa, kondisi dan situasi obyektif berdasarkan kajian hasil musyawarah pembangunan desa.

1) Bidang penyelenggaraan pemerintah Desa

Indikator kinerja (keberhasilan) diukur sebagai berikut:

- a) Meningkatnya pelayanan administrasi terhadap masyarakat.
- b) Menurunnya jumlah keluhan masyarakat terhadap pelayanan.
- c) Tersedianya Data Profil Desa yang akurat dan selalu update minimal 3 bulan sekali.
- d) Kemudahan informasi dapat dirasakan oleh masyarakat melalui papan informasi, surat dan lain sebagainya.
- e) Terselenggaranya musyawarah desa, musyawarah dusun dengan partisipatif, dinamis, sesuai jadwal dan target.
- f) Tersusunnya dokumen perencanaan desa sesuai standar meliputi RPJMDes, RKPDes, APBDes dan LKPJ Kades.

- g) Tersedianya ruang / tempat kerja, perangkat kerja dan biaya operasional bagi pemerintahan desa dan kelembagaan yang memadai.
- h) Tertib dan akuntabelnya administrasi, pembukuan dan pelaporan oleh Pemerintah Desa.

2) Bidang pelaksanaan Pembangunan

- a) Pembangunan infrastruktur dan lingkungan. Indikator kinerja (keberhasilan) diukur sebagai berikut:

(1) Terhubungnya akses transportasi antar dusun, dalam dusun dan antar desa melalui jalan makadam, rabat beton dan aspal serta jembatan dan bangunan pelengkap.

(2) Terbukanya akses transportasi bagi wilayah-wilayah yang selama ini terpencil.

(3) Meningkatnya status kelas jalan di beberapa ruas jalan.

(4) Transportasi hasil pertanian semakin baik dan mudah.

(5) Tertatanya lingkungan pemukiman, meliputi saluran drainase, sanitasi, gorong-gorong, TPT, MCK umum dan lain-lain.

(6) Terjaminnya pemeliharaan seluruh infrastruktur yang menjadi urusan desa.

(7) Berkurangnya debit banjir terutama di areal pemukiman.

(8) Berkurangnya kasus tanah longsor terutama di areal pemukiman.

b) Pembangunan sarana dan prasarana Kesehatan. Indikator kinerja (keberhasilan) diukur sebagai berikut:

- (1) Semakin meningkatnya kesadaran warga terhadap pentingnya kesehatan.
- (2) Semakin mudah dan murah masyarakat memperoleh akses pengobatan.
- (3) Tersedianya Gedung polindes yang memadai dan lengkap dengan alat-alat kesehatannya.
- (4) Tertatanya sanitasi yang baik.
- (5) Tersedianya air bersih bagi semua warga. Kegiatan posyandu semakin optimal dan rutin dilaksanakan.
- (6) Semakin berkurangnya angka gizi buruk pada balita.

c) Pembangunan sarana prasarana Pendidikan dan kebudayaan. Indikator kinerja (keberhasilan) diukur sebagai berikut:

- (1) Kualitas pendidikan usia dini semakin berkualitas, baik kurikulum, pengajar, media dan alat.
- (2) Tersedianya Gedung Paud dan TK beserta APE nya yang memadai di setiap dusun.
- (3) Angka buta huruf berkurang.
- (4) Akses warga terhadap lembaga pelatihan semakin mudah.
- (5) Tersedianya wadah-wadah pengembangan seni dan budaya

d) Pembangunan Sarana Prasarana Ekonomi. Indikator kinerja (keberhasilan) diukur sebagai berikut:

- (1) Keberadaan Bumdes yang semakin maju, sehat dan bermanfaat bagi masyarakat.
- (2) Semakin mudahnya petani mengakses pengadaan bibit, pupuk dan pemasaran hasil pertanian.
- (3) Semakin terjaminnya ketersediaan air baku bagi areal pertanian.
- (4) Jaringan irigasi semakin baik dan memenuhi syarat teknis.
- (5) Semakin berkualitasnya pengolahan lahan pertanian, meliputi teknik pengolahan, alat-alat yang digunakan dan kualitas benih dan pupuk.

(6) Makin mandiriya petani dalam memproduksi pupuk organik.

- (7) Makin mudahnya warga mengakses kebutuhan sembako.

e) Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Hidup. Indikator kinerja (keberhasilan) diukur sebagai berikut:

- (1) Terjaminnya ketersediaan debit air bersih untuk konsumsi masyarakat.
- (2) Terjaminnya perlindungan mata air.
- (3) Berkurangnya debit banjir saat musim penghujan.
- (4) Semakin luasnya area kawasan hijau.
- (5) Tanah longsor di sekitar tebing sungai semakin sedikit.

3) Bidang pembinaan kemasyarakatan

Indikator kinerja (keberhasilan) diukur sebagai berikut:

- a) Semakin meningkatnya kerukunan antar warga.
- b) Berfungsinya secara optimal kelembagaan masyarakat.
- c) Terjaminnya keamanan lingkungan dan ketenteraman warga.
- d) Tetap lestari adat istiadat dan budaya di masyarakat.
- e) Tersedianya sarana prasarana olah raga yang memadai.
- f) Tersedianya tempat/ruang pertemuan warga.
- g) Berkembangnya kegiatan seni dan budaya.

4) Bidang pemberdayaan Masyarakat

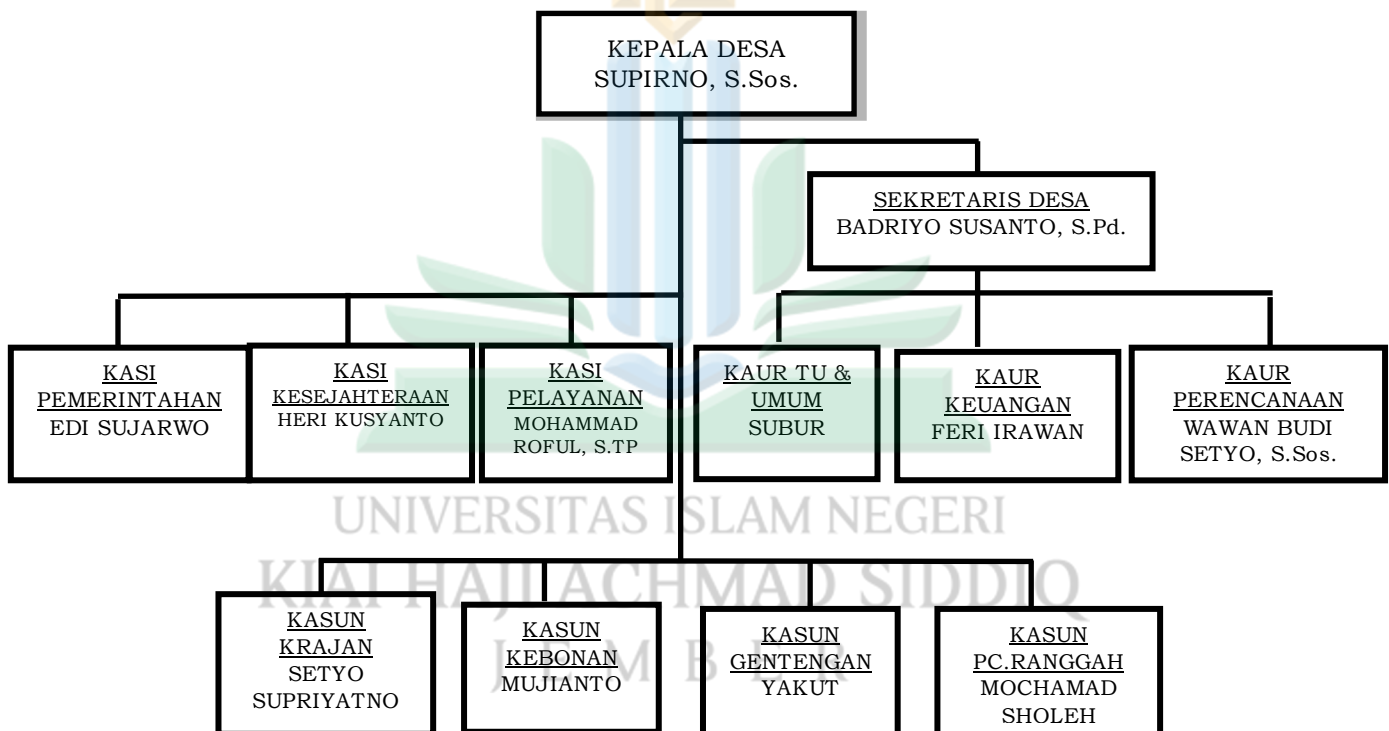
Indikator kinerja (keberhasilan) diukur sebagai berikut:

- a) Semakin bertambahnya jumlah kader-kader desa.
- b) Semakin dinamis dan berkembangnya Kelompok-kelompok Masyarakat (Pokmas).
- c) Masyarakat semakin mandiri mengembangkan teknologi kewirausahaan.
- d) Masyarakat semakin mudah mengakses permodalan dari dalam desa dan sekitar desa.
- e) Makin berkembangnya budi daya yang memanfaatkan potensi yang ada di dalam desa.
- f) Semakin meningkatnya kemitraan desa dan pelaku wirausaha dengan pihak swasta dan pemerintah.

5. Struktur Organisasi

Peraturan Desa Condro Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Desa Condro dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.2
Susunan Organisasi & Tata Kerja (SOTK)
Desa Condro Kecamatan Pasirian



6. Deskriptif Tugas dan Wewenang Pemerintah Desa Condro

a. Kepala Desa

Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Adapun fungsi – fungsi Kepala Desa yaitu:

- 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan Peraturan di desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah.
- 2) Pelaksanaan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, Kesehatan.
- 3) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
- 4) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda olahraga, dan karang taruna. dan
- 5) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

b. Sekretaris Desa

Membantu Kepala Desa dalam merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan dan bidang teknis, meliputi urusan perencanaan dan pelaporan, urusan keuangan, urusan administrasi umum, dan memberikan pelayanan administratif kepada Kepala Desa. Adapun fungsi – fungsi sekretaris Desa yaitu:

- 1) Penyusunan RPJM Desa.
- 2) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- 3) Pelaksanaan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- 4) Pelaksanaan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- 5) Pelaksanaan urusan keuangan seperti penatausahaan keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- 6) Pelaksanaan urusan perencanaan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, inventarisasi data pemerintahan desa, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- 7) Penyiapan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan terhadap pelaksanaan program kerja.
- 8) Penyiapan bahan dan data untuk perumusan kebijakan dan petunjuk operasional yang dilakukan oleh Kepala Desa.
- 9) Pengelolaan urusan rumah tangga desa dan rumah tangga Sekretariat Desa.

- 10) Pembuatan konsep naskah dinas, meneliti konsep surat dan konsep naskah dinas dari Pelaksana Teknis.
- 11) Pelaksanaan pengadaan perlengkapan, pemeliharaan dan inventarisasi barang.
- 12) Pelaksanaan urusan administrasi umum, pembinaan administrasi kepegawaian serta memberika pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat Desa.
- 13) Pengkoordinasian administrasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Desa.
- 14) Penyusunan dan pembentukan produk hukum Desa.
- 15) Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan APB Desa.
- 16) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan aset Desa.
- 17) Penyusunan APB Desa, Perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- 18) Penyelenggaraan rapat dinas dan keprotokolan
- 19) Pemberian sarana dan pertimbangan kepada Kepala Desa dibidang Sekretariat Desa.
- 20) Pelaksanaan pelaporan.
- 21) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa, dan
- 22) Sebagai koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)

c. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

Melaksanakan urusan Pemerintah Desa, Organisasi Umum dan Organisasi Perangkat Kota, kronik, mengawasi stok kekayaan Kota/Sumber Daya Desa, mengatur, mengendalikan dan menilai pelaksanaan organisasi pemerintah Kota bersama. Adapun fungsi – fungsi Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum yaitu:

- 1) Pengelolaan administrasi perangkat Desa yang meliputi pengumpulan dan pengolahan data perangkat desa.
- 2) Pengelolaan buku induk perangkat desa.
- 3) Pelaksanaan urusan surat menyurat.
- 4) Penyimpanan, pemeliharaan dan pengamanan arsip dan dokumen penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- 5) Penyusunan rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan ketatausahaan, perlengkapan, pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor.
- 6) Pelaksanaan inventarisasi, penyimpanan, dan pemeliharaan dan pengamanan asset Desa.
- 7) Penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.
- 8) Pengurusan administrasi kesejahteraan perangkat desa antara lain kesehatan, tunjangan dan pemberian tanda jasa.
- 9) Pengurusan ruma tangga desa dan rumah tangga Sekretariat Desa, keprotokolan, dan perjalanan dinas.

- 10) Pelaporan bidang pelaksanaan organisasi dan tata laksana serta administrasi perangkat desa.
- 11) Pemrosesan administrasi peserta pendidikan dan pelatihan.
- 12) Pengelolaan data dan pelaksanaan system informasi perangkat desa.
- 13) Memberikan sarana dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya; dan
- 14) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

d. Kepala Urusan Keuangan

Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa pengelolaan administrasi keuangan dan pembendaharaan Desa, serta mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa. Adapun fungsi – fungsi Kepala Urusan Keuangan yaitu:

- 1) Pelaksanaan administrasi dan pengelolaan keuangan yang meliputi pembukuan, petanggung jawaban, verifikasi dan mempersiapkan data guna penyusunan dan perhitungan APB Desa.
- 2) Penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan APB Desa dan mempersiapkan secara periodik program kerja dibidang urusan keuangan.
- 3) Pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran.

- 4) Penyusunan laporan hasil kegiatan dibidang administrasi Rincian Penggunaan Dana (RPD).
- 5) Pengadministrasian penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

e. Kepala Urusan Perencanaan

Bertugas membantu kegiatan Sekretaris Desa dalam penyusunan rencana, program kerja, evaluasi dan laporan kinerja pemerintah Desa. Adapun fungsi – fungsi Kepala Urusan Perencanaan yaitu:

- 1) Mempersiapkan bahan RPJMDes dan PKPDes.
- 2) Mempersiapkan bahan penyusunan evaluasi dan pelapor pelaksanaan APBDes.
- 3) Persiapan bahan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 4) Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa.
- 5) Pengelolaan sistem informasi manajemen data di wilayah Desa.
- 6) Mempersiapkan bahan pelaksanaan Musrenbangdes.
- 7) Program Kerja Pemerintah Desa, dan
- 8) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

f. Kepala Seksi Pemerintahan

Membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas operasional di bidang penyusunan rencana, pelaksanaan, dan melaporkan hasil

kegiatan bidang Pemerintahan Desa. Adapun fungsi – fungsi Kepala Seksi Pemerintahan yaitu:

- 1) Pelaksanaan manajemen Tata Praja Pemerintahan.
- 2) Penyusunan rancangan regulasi atau kebijakan pemerintah desa.
- 3) Pembinaan masalah pertahanan.
- 4) Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 5) Pelaksanaan upaya perlindungan Masyarakat.
- 6) Pelaksanaan urusan kependudukan.
- 7) Penataan dan pengelolaan wilayah desa.
- 8) Pendataan pengelolaan Profil Desa; dan
- 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

g. Kepala Seksi Kesejahteraan

Membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas operasional dibidang menyusun rencana, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan bidang Kesejahteraan. Adapun fungsi – fungsi Kepala Seksi Pemerintahan yaitu:

- 1) Penyimpanan bahan peyusunan program pelayanan pendidikan, kesehatan masyarakat, peranan wanita, Keluarga Berencana (KB), kepemudaan Olahraga, kesenian dan kebudayaan, peningkatan sumber daya masyarakat, pembinaan kehidupan, keagamaan, bantuan bencana alam, dan bantuan sosial.
- 2) Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, Kesehatan.

- 3) Melaksanakan sosialisasi serta penguatan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonom, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda olahraga, dan karang taruna.
- 4) Memberikan fasilitas kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program bidang kemasyarakatan kepada Kepala Desa; dan
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

h. Kepala Seksi Pelayanan

Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas operasional di bidang penguatan partisipasi dan pemberdayaan sosial budaya masyarakat. Adapun fungsi – fungsi Kepala Seksi Pelayanan yaitu:

- 1) Penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban Masyarakat.
- 2) Peningkatan upaya partisipasi Masyarakat.
- 3) Pelestarian nilai sosial, budaya, dan keagamaan.
- 4) Pelayanan dan pembinaan ketenagakerjaan.
- 5) Menyusun program kerja yang meliputi penyelenggaraan pembinaan perekonomian masyarakat Desa, perkreditan rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, hutan Desa, perikanan, industri kecil, usaha informal, peningkatan, produksi Desa.

- 6) Pelaksanaan program, kegiatan dan pemberian pelayanan di bidang pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat.
- 7) Pemeliharaan prasarana dan sarana lingkungan Desa.
- 8) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dan
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Desa.

i. Kepala Dusun

Membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya dalam wilayah Dusun yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan Masyarakat. Adapun fungsi – fungsi Kepala Dusun yaitu:

- 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- 2) Pengawasan pelaksanaan pembangunan diwilayahnya.
- 3) Pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- 4) Pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa.⁴⁰

⁴⁰ Wawancara dengan bpk Badriyo selaku sekretaris Kantor Desa Condro, 03 November 2023

B. Penyajian Data dan Analisis

Pada Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, data yang diperoleh serta melakukan wawancara dengan para narasumber, maka diperoleh informasi mengenai Analisis Penganggaran, Penatausahaan, dan Akuntansi Pada Laporan Keuangan di Kantor Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penyusunan Anggaran, Penggunaan Anggaran, dan Pembukuan dan Pengumuman Anggaran menjelaskan bahwa untuk mewujudkan pendapatan negara yang lebih efisien, efektif, bijaksana, menarik, mudah dan berkemampuan. dan Anggaran Konsumsi serta merencanakan dan menyajikan laporan anggaran pemerintah pusat sesuai dengan standar pembukuan dalam penerapan tolak ukur pembukuan pemerintah.⁴¹

Berdasarkan penjelasan diatas penulis melakukan wawancara dan terjun langsung ke lapangan menemukan beberapa:

1. Proses penganggaran, penatausahaan, dan akuntansi di Kantor Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan hasil wawancara pertama tentang penganggaran dengan Bapak Feri Irawan sebagai Bendahara Desa yaitu sebagai berikut:

“Dalam proses pengambilan keputusan terkait alokasi dana penganggaran di Kantor Desa dengan melakukan musyawarah desa, menghadirkan BPD, LKPM, tim penggerak PKK, RT, RW, tenaga Kesehatan yang ada di Desa (Bidan Desa), pendamping

⁴¹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023

desa dari kecamatan, tokoh Masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda”.⁴²

Dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan proses pengambilan keputusan terkait Penganggaran di Kantor Desa Condro harus menghadirkan tokoh Masyarakat dan penggerak desa lainnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, rancangan APBDes disetujui oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Penetapan Peraturan Desa mengenai APBDes harus dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan, sementara APBDes harus ditetapkan sebelum memasuki tahun anggaran baru.⁴³

Berdasarkan hasil wawancara kedua tentang penganggaran dengan Bapak Feri Irawan sebagai Bendahara Desa yaitu menyatakan bahwa:

“Kendala yang sering di hadapi dalam penyusunan anggaran desa adalah jumlah anggaran yang terbatas di bandingkan dengan usulan masyarakat desa. Dan cara mengatasinya yaitu musyawarah untuk perangkingan mana yang menjadi prioritas desa atau kebutuhan desa akan di dahulukan”.⁴⁴

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara diatas bahwa aparatur desa melakukan upaya untuk mecegah kekurangan dana dalam penyusunan anggaran desa. Akan tetapi upaya yang sudah dilakukan masih

⁴² Wawancara dengan Bapak Feri Irawan selaku Bendahara Desa di Kantor Desa Condro, 03 November 2023

⁴³ Wawancara dengan Bapak Feri Irawan selaku Bendahara Desa di Kantor Desa Condro, 03 November 2023

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Feri Irawan selaku Bendahara Desa di Kantor Desa Condro, 03 November 2023

saja mengalami kendala. Adapun kendala yang sering dihadapi dalam penyusunan anggaran di Kantor Desa yaitu:

- a. Keterbatasan sumber daya keuangan: Kendala ini sering dialami oleh kantor desa yang memiliki jumlah pendapatan rendah. Hal ini membuat kantor desa sulit untuk mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhan dan prioritas.
- b. Keterbatasan sumber daya manusia: Seringkali kantor desa tidak memiliki tim atau staf keuangan yang cukup untuk menyusun anggaran secara efektif. Hal ini dapat mengakibatkan kesalahan atau kurang teliti dalam melakukan penghitungan dan penataan anggaran,
- c. Tuntutan masyarakat yang tinggi: Seringkali masyarakat mengharapkan kantor desa untuk menyediakan berbagai fasilitas dan layanan publik yang memerlukan biaya besar. Namun, kantor desa tidak selalu memiliki dana yang cukup untuk memenuhi tuntutan tersebut.
- d. Kompleksitas regulasi: Penyusunan anggaran kantor desa harus mematuhi aturan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal ini dapat menghambat proses penyusunan anggaran dan memperumit proses administratif.
- e. Perubahan kebijakan: Seringkali kantor desa mengalami perubahan kebijakan dari pemerintah pusat, seperti perubahan alokasi dana atau kebijakan baru yang harus diimplementasikan. Hal ini dapat

menyebabkan perubahan dalam rencana anggaran dan membuat kantor desa harus memulai ulang proses penyusunan anggaran.

- f. Tingkat partisipasi masyarakat yang rendah: Partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran di kantor desa sangat penting. Namun, seringkali tingkat partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran masih rendah sehingga membuat kantor desa kesulitan dalam mengetahui kebutuhan dan prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Dari hasil wawancara ketiga tentang penganggaran dengan Bapak Feri Irawan sebagai Bendahara Desa yaitu:

“Langkah-langkah yang diambil untuk Menyusun anggaran di Kantor Desa di awal pemerintahan Kantor Desa ada Musdus (Musyawarah Dusun) kemudian di bentuk RPJMD kemudian dilanjutkan dengan Musdes (Musyawarah Desa) dan di sinkronkan dengan visi misi Desa dan Kabupaten. Hasil Musdes kemudian di saring atau dipilah untuk di bangun dan dibentuk agar mempermudah pembuatan RAB dan Buku Anggaran.”⁴⁵

Dapat disimpulkan bahwa Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan faktor krusial dalam mewujudkan *good governance* dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDesa adalah bagian dari penilaian tata kelola pemerintahan yang baik. Memahami setiap tahapan dalam pengelolaan APBDesa (penyusunan, pelaksanaan, pertanggungjawaban) memiliki dampak signifikan terhadap model

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Feri Irawan selaku Bendahara Desa di Kantor Desa Condro, 03 November 2023

penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri. Dokumen APBDesa haruslah dibuat dan dikelola dengan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel, sehingga rakyat sebagai pemilik anggaran dapat terlibat dalam proses penetapan dan penggunaan dana desa. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran tersebut benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan memberikan keyakinan bahwa tata kelola pemerintahan desa berjalan dengan baik. Pengelolaan Keuangan Desa dimulai dari tahap perencanaan, yaitu penyusunan APBDesa, oleh karena itu, penting untuk memahami secara komprehensif berbagai aspek APBDesa: fungsi, ketentuan, struktur, serta mekanisme penyusunannya.⁴⁶

Gambar 4.3
Tahapan Penyusunan APBDes



Sumber: website desa

Dari hasil wawancara keempat tentang penganggaran dengan Bapak Feri Irawan selaku Bendahara Desa menyatakan bahwa:

⁴⁶ Admin desa, "Tahapan Penyusunan APBDes", diakses pada tanggal 08 Desember 2023, jam 18.42, <https://rarangselatan.desa.id/artikel/2017/8/28/tahapan-penyusunan-apbdes>

“Kantor desa memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan sesuai dengan prioritas dan kebutuhannya dengan cara Musdes (Musyawarah Desa) menyampaikan apa yang diperlukan di wilayah masing-masing kemudian di kumpulkan untuk dilakukan perangkaan karena terbatasnya anggaran.”⁴⁷

Dapat disimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa dan APB Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Perdes APBDes 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera.⁴⁸

Dari hasil wawancara kelima tentang penganggaran dengan Bapak Feri Irawan sebagai Bendahara Desa yaitu:

“strategi yang dilakukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana anggaran di kantor desa yaitu transparansi dilakukan dengan cara publikasi melalui banner dan melalui Facebook Desa (Desa Condro Pasirian Lumajang), sedangkan akuntabilitas Masyarakat melakukan pengawasan Pembangunan”.⁴⁹

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Feri Irawan selaku Bendahara Desa di Kantor Desa Condro, 03 November 2023

⁴⁸ Bantal desa, diakses pada tanggal 08 Desember 2023, pada jam 19.09 “Pendapatan”, <https://www.bantal.desa.id/artikel/2022/1/3/anggaran-pendapatan-dan-belanja-desa-apbdesa-tahun-anggaran-2022>

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Feri Irawan selaku Bendahara Desa di Kantor Desa Condro, 03 November 2023

Dapat disimpulkan bahwa Transparansi dalam pemerintahan desa adalah kemampuan pemerintah desa untuk bertanggung jawab atas kinerjanya kepada masyarakat dan memberikan akses informasi yang jelas, terbuka, dan mudah dimengerti. Ketika pemerintah desa tidak bersikap transparan dalam menjalankan tugas dan fungsi-fungsinya, hal tersebut dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan masyarakat dan menimbulkan sikap skeptis terhadap kinerja pemerintah desa.⁵⁰

Tabel 4.5
Anggaran Pendapatan & Belanja Desa 2023

| Pendapatan | | |
|-------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| No. | Jenis/Sumber Pendapatan | Jumlah (Rp.) |
| A. | Pendapatan Asli Dana Desa | Rp 250. 639.450,00 |
| 1. | Tanah Kas Desa | Rp 179.300.000,00 |
| 2. | Hasil BUMDes | Rp 71.339.450,00 |
| B. | Pendapatan / Dana Transfer | Rp 1.883.428.127,00 |
| 1. | Dana Desa (DD) | Rp 888.060.000,00 |
| 2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Rp 36.686.127,00 |
| No. | Jenis/Sumber Pendapatan | Jumlah (Rp.) |
| 3. | Alokasi Dana Desa (ADD) | Rp 583.682.000,00 |
| 4. | Bantuan Keuangan dari Kabupaten | Rp 375.000.000,00 |
| 5. | Pendapatan yang lainnya | Rp 0,00 |
| | Total Pendapatan (A+B) | Rp 2.134.067.577,00 |

⁵⁰ Panda, diakses pada tanggal 08 Desember 2023, pada pukul 19.24, “Transparansi Pemerintah Desa: kunci Kepedulian dan Akuntabilitas”, <https://www.panda.id/transparansi-pemerintahan-desa/>

| Belanja | | |
|-----------------------------------|--|----------------------------|
| No. | Kegiatan/Bidang | Jumlah (Rp.) |
| 1. | Penyelenggaraam Pemerintahan Desa | Rp 848.162.166,23 |
| 2. | Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 907.122.000,00 |
| 3. | Pembinaan Kemasyarakatan Desa | Rp 77.459.000,00 |
| 4. | Pemberdayaan Masyarakat Desa | Rp 153.838.000,00 |
| 5. | Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa | Rp 180.000.000,00 |
| Jumlah Belanja (1+2+3+4+5) | | Rp 2.166.581.166,23 |
| Pembiayaan | | |
| No. | Kegiatan | Jumlah (Rp.) |
| A. | Kegiatan Pembiayaan SILPA Tahun 2022 | Rp 32.513.589,23 |
| B. | Pengeluaran Pembiayaan | Rp 0 |
| Jumlah Pembiayaan (1-2) | | Rp 32.513.589,23 |
| Total Saldo | | 0,00 |

Sumber data: Kantor Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang

Dari hasil wawancara pertama tentang akuntansi dengan Bapak Feri Irawan selaku Bendahara Desa menjelaskan bahwa:

“Sistem akuntansi di Kantor Desa sudah dijalankan dan diatur, kemudian desa sudah memakai aplikasi SISKEUDES. Pada tahun 2019-2021 akuntansi desa dilakukan secara offline kemudian pada tahun 2022-sekarang dilakukan secara online”.⁵¹

Dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi desa pada tahun 2019-2021 dilakukan secara offline dengan mengirimkan data ke Bendahara Desa lalu oleh Bendahara Desa di kirimkan ke Kecamatan. Kemudian pada tahun 2022 – sekarang sistem akuntansi Desa sudah memakai aplikasi SISKEUDES.

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Feri Irawan selaku Bendahara Desa di Kantor Desa Condro, 03 November 2023

Dari hasil wawancara kedua tentang akuntansi dengan Bapak Feri

Irawan selaku Bendahara Desa menjelaskan bahwa:

“Kantor Desa mengembangkan kompetensi dan keahlian staf dalam proses akuntansi di Kantor Desa yaitu antara lain: TPD (tenaga pendamping desa). Untuk tahun 2023 masih belum ada pengembangan kompetensi dan keahlian staf Desa. Koordinasi Desa terkait pengembangan kompetensi dan keahlian staf dilakukan melalui whatsapp lalu tahun sebelumnya Kantor Desa mengadakan Bimtek.”⁵²

Dari hasil wawancara ketiga tentang akuntansi dengan Bapak Feri

Irawan selaku Bendahara Desa yaitu:

“Pengendalian internal sudah diterapkan dalam sistem akuntansi Kantor Desa untuk mencegah kesalahan dan penyalahgunaan. Semua pencairan gaji sudah terlaksana dengan baik dan benar.”⁵³

Dari hasil wawancara keempat tentang akuntansi dengan Bapak

Feri Irawan selaku Bendahara Desa menjelaskan bahwa:

“Semua pencatatan akuntansi di Kantor Desa Sudah dilakukan secara terorganisir”.⁵⁴

Dari hasil wawancara kelima tentang akuntansi dengan Bapak Feri

Irawan selaku Bendahara Desa yaitu:

“Pembagian tugas dan tanggungjawab dalam fungsi akuntansi di Kantor Desa sudah terlaksana. Pembagian tugas sudah sesuai dengan tanggungjawab disetiap perangkat Desa”.⁵⁵

⁵² Wawancara dengan Bapak Feri Irawan selaku Bendahara Desa di Kantor Desa Condro, 03 November 2023

⁵³ Wawancara dengan Bapak Feri Irawan selaku Bendahara Desa di Kantor Desa Condro, 03 November 2023

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Feri Irawan selaku Bendahara Desa di Kantor Desa Condro, 03 November 2023

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Feri Irawan selaku Bendahara Desa di Kantor Desa Condro, 03 November 2023

Dari hasil wawancara pertama tentang penatausahaan dengan Bapak Wawan Budi Setyo, S. Sos selaku kaur perencanaan menjelaskan bahwa:

“Proses penatausahaan di kantor desa sudah menggunakan aplikasi SISKEUDES”.⁵⁶

Dari hasil wawancara kedua tentang penatausahaan dengan Bapak Wawan Budi Setyo, S.Sos selaku kaur perencanaan sebagai berikut:

“Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penatausahaan di Kantor Desa yaitu dengan menyinkronkan data dan selalu koordinasi dengan kecamatan dan pusat”.⁵⁷

Dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, sosialisasi dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan siskeudes sedangkan manajemen kontrol tidak berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan siskeudes.⁵⁸

Dari hasil wawancara ketiga tentang penatausahaan dengan Bapak Wawan Budi Setyo, S.Sos selaku kaur perencanaan menjelaskan bahwa :

“Dalam menghadapi kecurangan atau penyimpangan Kantor Desa selalu berkomunikasi dengan kelembagaan BPD, LKMD, pencairan dana SPP”.⁵⁹

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Wawan Budi Setyo, S.sos selaku kaur Perencanaan di Kantor Desa Condro, 03 November 2023

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Wawan Budi Setyo, S.sos selaku kaur Perencanaan di Kantor Desa Condro, 03 November 2023

⁵⁸ Nugroho, “Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)”, (*Jurnal Akuntansi Manajemen & Perbankan Syariah*, Universitas Sains Al’ Qur’an), 03, No. 2 (2023), 1-14

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Wawan Budi Setyo, S.sos selaku kaur Perencanaan di Kantor Desa Condro, 03 November 2023

Dari hasil wawancara keempat tentang penatausahaan dengan Bapak Wawan Bdi Setyo, S.Sos selaku kaur perencanaan yaitu :

“tantangan yang sering dihadapi dalam penatausahaan di Kantor Desa permasalahan tentang pajak dari 10% ke 11%. Dalam transparansi laporan keuangan pihak Desa selalu terbuka dalam transparansi laporan keuangan.”⁶⁰

Dari hasil wawancara kelima tentang penatausahaan dengan Bapak Wawan Budi Setyo, S.Sos selaku kaur perencanaan menjelaskan bahwa :

“Penatausahaan sudah dilakukan secara terorganisir dan Kecamatan selalu monitoring setiap 3 bulan dalam penggunaan realisasi anggaran.”⁶¹

Dapat disimpulkan bahwa laporan realisasi anggaran adalah sebuah laporan yang berisi tentang ringkasan sumber anggaran, alokasi anggaran tersebut, serta penggunaan sumber daya yang dikelola suatu instansi dalam satu periode berikutnya dan akan dibandingkan dengan periode yang sebelumnya.⁶²

Dari hasil wawancara pertama tentang laporan keuangan dengan Bapak Wawan Budi Setyo, S.Sos selaku kaur perencanaan yaitu :

“Tanggapan dan umpan balik mayrakat terhadap laporan keuangan desa yaitu Masyarakat selama ini sudah memahami terkait transparansi laporan keuangan desa dan perangkat desa sudah melakukan publikasi laporan keuangan lewat media sosial yaitu Facebook desa.”

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Wawan Budi Setyo, S.sos selaku kaur Perencanaan di Kantor Desa Condro, 03 November 2023

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Wawan Budi Setyo, S.sos selaku kaur Perencanaan di Kantor Desa Condro, 03 November 2023

⁶² Andiana, diakses pada tanggal 08 Desember 2023, pada jam 20.53 “laporan realisasi anggaran: unsur, contoh, dan cara membuatnya”, <https://majoo.id/solusi/detail/laporan-realisasi-anggaran>

Dari hasil wawancara kedua tentang laporan keuangan dengan Bapak Wawan Budi Setyo, S.Sos selaku kaur perencanaan menjelaskan bahwa :

“Selama belum ada perbedaan secara teknis dalam laporan keuangan dari tahun sebelumnya, maka laporan keuangan tetap sama.”⁶³

Dapat disimpulkan bahwa Laporan keuangan desa adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa selama periode waktu tertentu. Informasi akuntansi ini disusun untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, yaitu: 1: Internal, yaitu pihak-pihak yang berada dalam struktur penyelenggara urusan pemerintahan desa, yakni Kades, Sekdes, Bendahara dan Kaur atau kepala seksi. 2: Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yaitu pihak yang bertanggungjawab terhadap realisasi penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa atau APB Desa. 3: Pemerintah, adalah pemerintah kabupaten/kota, propinsi, dan pusat. Pihak-pihak tersebut merupakan penanggungjawab penyaluran dan pelaksanaan dana desa yang berasal dari APBN dan APBD. 4: Pihak Lainnya, yakni pihak-pihak selain yang telah disebutkan di atas, antara lain LSM (lembaga swadaya masyarakat) atau NGO (*non governmental organization*).⁶⁴

⁶³ Wawancara dengan Bapak Wawan Budi Setyo, S.sos selaku kaur Perencanaan di Kantor Desa Condro, 03 November 2023

⁶⁴ Wadiyo, SE, diakses pada tanggal 08 Desember 2023, pada jam 21.06 “Laporan Keuangan Desa”, <https://manajemenkeuangan.net/laporan-keuangan-desa/>,

2. Kesesuaian proses Penganggaran, Penatausahaan, dan Akuntansi pada Laporan Keuangan di Kantor Desa Condro dengan Standar di Indonesia.

Dari hasil wawancara keempat tentang laporan keuangan dengan Bapak Wawan Budi Setyo, S.Sos selaku kaur perencanaan yaitu :

“Laporan keuangan harus menggunakan Bahasa yang jelas dan dapat dipahami oleh pembacanya.”⁶⁵

Dari hasil wawancara kelima tentang laporan keuangan dengan Bapak Wawan Budi Setyo, S.Sos selaku kaur perencanaan menjelaskan bahwa:

“Laporan keuangan harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Setiap 3 bulan sekali volume laporan keuangan diukur oleh pihak Kecamatan.”⁶⁶

Dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari entitas yang bersangkutan. Laporan keuangan digunakan untuk memberikan informasi kepada pemilik entitas, pihak terkait, dan pengguna lainnya tentang kinerja keuangan dan posisi keuangan suatu organisasi pada suatu periode waktu tertentu. Untuk mencerminkan keadaan yang sebenarnya, laporan keuangan harus memenuhi prinsip akuntansi yang relevan dan berlaku umum, seperti PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan). Prinsip akuntansi ini menetapkan pedoman untuk mengukur, mengungkapkan, dan melaporkan

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Wawan Budi Setyo, S.sos selaku kaur Perencanaan di Kantor Desa Condro, 03 November 2023

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Wawan Budi Setyo, S.sos selaku kaur Perencanaan di Kantor Desa Condro, 03 November 2023

informasi keuangan secara objektif dan transparan. Beberapa prinsip utama dalam mencerminkan keadaan yang sebenarnya adalah:

a. Kesetaraan

Laporan keuangan harus adil dan objektif serta tidak menguntungkan pihak tertentu. Semua transaksi dan kejadian bisnis yang relevan harus diakui dan diperlakukan dengan wajar.

b. Konsistensi

Metode akuntansi dan kebijakan akuntansi harus diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun, kecuali ada alasan yang kuat untuk mengubahnya. Hal ini penting agar dapat membandingkan informasi keuangan dari periode sebelumnya dengan periode saat ini.

c. Keterpahaman

Laporan keuangan harus disusun dengan bahasa, format, dan penjelasan yang mudah dipahami oleh pengguna yang beragam. Informasi keuangan harus jelas, terperinci, dan mendalam sehingga pengguna dapat mengambil keputusan yang baik.

d. Keandalan

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipercaya dan diandalkan. Hal ini mencakup pencatatan yang akurat, verifikasi yang baik, dan pengawasan yang ketat dari proses penyusunan laporan keuangan.

e. Penyajian jujur:

Laporan keuangan harus jujur dan tidak menyesatkan pihak yang menggunakan informasi tersebut. Informasi yang signifikan tidak boleh disembunyikan atau disajikan dengan cara yang menyesatkan. Dengan mematuhi prinsip-prinsip tersebut, laporan keuangan dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan menjadi alat yang berguna untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan transparan dalam lingkungan bisnis.

C. Pembahasan Temuan

1. Proses Penganggaran, Penatausahaan, dan Akuntansi di Kantor Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan dari hasil penelitian, wawancara serta dokumentasi dan berdasarkan teori yang sudah ada maka, pada Kantor Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang terdapat beberapa proses Penganggaran, Penatausahaan, dan Akuntansi Pada Laporan Keuangan yaitu:

a. Penganggaran

Proses penganggaran di Kantor Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang melibatkan perencanaan alokasi dana yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa meliputi: penyusunan anggaran pendapatan dan belanja (APB) dengan melibatkan seluruh *stakeholder* Desa serta mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, pemetaan penerimaan dan

pengeluaran keuangan berdasarkan program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan, perencanaan program kerja beserta kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tertentu, penentuan anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung program kerja dan kegiatan yang direncanakan, melakukan musyawarah dengan pemangku adat Desa terkait transparansi anggaran seperti bidan Desa, ketua PKK, RT/RW, Masyarakat, kepala dusun, Babinsa, menyusun RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran Kegiatan dan Laporan) yang berisi rincian anggaran untuk setiap kegiatan yang direncanakan. Pada Kantor Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang tidak pernah mengalami permasalahan dalam pelayanan publik. Banyak masyarakat yang merasa puas dalam pelayanan di Kantor Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.

Kualitas sumber daya manusia di Kantor Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang tingkat Pendidikannya lulusan SMA-S1 sehingga penilaian kualitas sumber daya manusia di Kantor Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang dapat melibatkan kriteria termasuk keterampilan, pengetahuan, sikap, dan kemampuan untuk memenuhi tuntutan pekerjaan. Tingkat Pendidikan sangat berpengaruh pada pola pikir dan tingkah laku aparatur Desa. banyak aparatur Desa di Kantor Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang sangat baik dalam menyikapi dan melayani Masyarakat. Alasan yang diberikan oleh mereka adalah kepentingan

Masyarakat harus diutamakan karena untuk menjaga kepercayaan masyarakat di Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. kepatuhan terhadap regulasi di Kantor Desa Condro mengacu pada ketaatan dalam Menyusun, mengelola, dan melaporkan anggaran sesuai dngan ketentuan dan regulasi yang berlaku.

b. Penatausahaan

Penatausahaan melibatkan pencatatan setiap transaksi keuangan yang terjadi di Kantor Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang secara akurat dan sistematis. Hal ini termasuk juga dengan pembukuan, penerimaan, dan pengeluaran dana Desa serta dokumentasi yang jelas mengenai setiap transaksi keuangan. kepatuhan terhadap regulasi di Kantor Desa Condro dalam penatausahaan merujuk pada ketaatan atau kepatuhan dalam menjalankan prosedur dan aturan yang berlaku dalam mengelola administrasi dan keuangan di Kantor Desa. Regulasi Penatausahaan meliputi tata Kelola keuangan, pengelolaan aset, pelaporan keuangan, tata cara pengelolaan dan penyimpanan dokumen penting.

Kualitas sumber daya manusia di Kantor Desa Condro Tingkat Pendidikannya lulusan SMA-S1 sehingga penilaian kualitas sumber daya manusia di Kantor Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang harus memiliki keahlian dan pengetahuan dalam penatausahaan untuk memastikan bahwa semua proses administrasi dan keuangan di Kantor Desa Condro berjalan dengan baik dan sesuai

dengan peraturan yang berlaku. Pada Kantor Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang tidak pernah mengalami permasalahan dalam pelayanan publik.

c. Akuntansi

Proses akuntansi melibatkan penyiapan laporan keuangan yang akurat dan terperinci di Kantor Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. Hal ini mencakup pembuatan neraca, laporan laba rugi, serta laporan arus kas untuk memberikan informasi yang berguna tentang posisi keuangan di Kantor Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. Sumber daya manusia yang dimiliki Kantor Desa Condro secara kompetensi belum ada yang lulusan dari Sarjana Akuntansi sehingga Kantor Desa Condro hanya mencatat laporan keuangannya berdasarkan kemampuan/regulasi yang dimiliki. Fasilitas di Kantor Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang sudah menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

2. Proses Penganggaran, Penatausahaan, dan Akuntansi di Kantor Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang sesuai dengan standar di Indonesia.

- a. Proses penganggaran, penatausahaan, dan akuntansi di Kantor Desa Condro mengikuti standar yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Standar penganggaran di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip dasar penganggaran yang meliputi: penganggaran harus dilakukan

secara terbuka dan transparansi agar Masyarakat bisa mengetahui aliran dana publik dan penggunaannya, penggunaan anggaran harus dipertanggungjawabkan dan dilakukan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Proses Penganggaran, Penatausahaan, dan akuntansi dapat dilihat berdasarkan tabel dibawah ini :

Tabel 4.6
Ringkasan Penganggaran, Penatausahaan, dan akuntansi
berdasarkan standar di Kantor Desa dan di Indonesia

| | Berdasarkan standar di Kantor Desa Condro | Berdasarkan standar di Indonesia | Keterangan |
|--------------|--|--|---|
| Penganggaran | Proses penganggaran berdasarkan standar di Kantor Desa melibatkan beberapa tahapan seperti: pemantauan dan evaluasi, identifikasi kebutuhan masyarakat, merencanakan anggaran, Menyusun anggaran, pengesahan anggaran, dan pelaksanaan anggaran. | Proses penganggaran berdasarkan standar di Indonesia ada beberapa tahapan: perencanaan anggaran, penetapan standar anggaran, pengalokasian anggaran, penyusunan anggaran, perencanaan keuangan, monitoring dan evaluasi. | Proses penganggaran di Kantor Desa Condro sudah sesuai dengan standar di Indonesia. Selain itu proses penganggaran juga harus mematuhi regulasi di Indonesia. |
| | Proses penatausahaan berdasarkan standar di Kantor Desa melibatkan beberapa prosedur: penerimaan dan | Proses penatausahaan berdasarkan standar di Indonesia meliputi beberapa tahapan: | Proses penatausahaan di kantor Desa Condro sudah sesuai dengan |

| | | | |
|---------------|---|--|---|
| Penatausahaan | pencatatan, verifikasi dan validasi, penyimpanan dan pengarsipan, pelaporan, dan pemeriksaan. | pengumpulan data dan dokumentasi, pemrosesan data, penyusunan laporan, pemeriksaan, penyelesaian laporan. | standar di Indonesia. Seluruh proses penatausahaan sesuai dengan standar penatausahaan yang berlaku di Indonesia. |
| Akuntansi | Proses akuntansi di Kantor Desa mengikuti standar akuntansi yang berlaku melalui beberapa tahapan: pengumpulan data keuangan, pengolahan data keuangan, pembuatan laporan keuangan, pemeriksaan, penyampaian laporan keuangan, penyesuaian dan perbaikan laporan keuangan | Proses akuntansi berdasarkan standar di Indonesia meliputi tahapan sebagai berikut: identifikasi transaksi, mengukur nilai transaksi tersebut berdasarkan standar akuntansi yang berlaku, pelaporan. | Proses akuntansi di Kantor Desa Condro sudah sesuai dengan standar di Indonesia. Seluruh proses akuntansi tersebut harus mematuhi standar akuntansi yang ditetapkan di Indonesia agar informasi keuangan yang dilaporkan dapat dipercaya dan relevan. |

Sumber: diolah diolah peneliti tahun 2024

Proses Penganggaran, Penatausahaan di Kantor Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang sesuai dengan standar-standar yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Beberapa standar yang harus di patuhi dalam melaksanakan proses penganggaran, penatausahaan, dan akuntansi antara lain: standar akuntansi pemerintahan (SAP), standar pengelolaan keuangan (SAP), standar pengelolaan keuangan desa (SKPD),

dan peraturan keuangan (Perka). Penganggaran di Kantor Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang juga harus mengikuti proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang transparan dan akuntabel. Penatausahaan keuangan Desa juga harus dilakukan dengan tertib, termasuk pencatatan keuangan, pengelolaan aset dan pelaporan keuangan yang akurat.

Sementara itu, akuntansi di Kantor Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang juga harus prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum seperti keterbukaan, kewajaran, kehati-hatian, dan lain sebagainya. Semua proses tersebut harus dilakukan dengan cermat dan teliti agar keuangan Desa dapat dikelola dengan baik. Dengan mematuhi standar tersebut, diharapkan proses penganggaran, penatausahaan, dan akuntansi dapat dilaksanakan secara transparan, akurat, dan dapat dipercaya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan bab IV dan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang analisis penganggaran, penatausahaan, dan akuntansi pada laporan keuangan di Kantor Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penganggaran, Penatausahaan, dan akuntansi di Kantor Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang yaitu:

a. Penganggaran.

Penganggaran di Kantor Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang melibatkan perencanaan alokasi dana yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa meliputi: penyusunan anggaran pendapatan dan belanja (APB), pemetaan penerimaan dan pengeluaran keuangan berdasarkan program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

b. Penatausahaan.

Penatausahaan melibatkan pencatatan setiap transaksi keuangan yang terjadi di Kantor Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang secara akurat dan sistematis, pembukuan, penerimaan, dan pengeluaran dana Desa serta dokumentasi yang jelas mengenai setiap transaksi keuangan.

c. Akuntansi.

Proses akuntansi melibatkan penyiapan laporan keuangan yang akurat dan terperinci di Kantor Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang mencakup pembuatan neraca, laporan laba rugi, serta laporan arus kas untuk memberikan informasi yang berguna tentang posisi keuangan di Kantor Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. Sumber daya manusia yang dimiliki Kantor Desa Condro secara kompetensi belum ada yang lulusan dari Sarjana Akuntansi sehingga Kantor Desa Condro hanya mencatat laporan keuangannya berdasarkan kemampuan/regulasi yang dimiliki.

2. Proses Penganggaran, Penatausahaan, dan Akuntansi di Kantor Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang sesuai dengan standar di Indonesia.

Penganggaran, penatausahaan, dan akuntansi di Kantor Desa Condro sesuai dengan standar di Indonesia yaitu: penganggaran harus dilakukan secara terbuka dan transparansi agar Masyarakat bisa mengetahui aliran dana publik dan penggunaannya. Oleh karena itu, seluruh proses tersebut harus dilakukan sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Dengan mematuhi standar tersebut diharapkan proses penganggaran, penatausahaan, dan akuntansi dapat dilaksanakan secara transparan, akurat, dan dapat dipercaya.

B. Saran

Berdasarkan penjabaran dari kesimpulan maka, saran yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Melibatkan seluruh staf Kantor Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang dalam proses penganggaran, penatausahaan, dan Akuntansi dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.
2. Memberikan pelatihan untuk staf/bendahara keuangan di Kantor Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang untuk memastikan mereka memahami standar akuntansi yang berlaku dan dapat menjalankan proses penganggaran, penatausahaan, dan akuntansi dengan baik.
3. Memperkuat transparansi dengan melibatkan Toko masyarakat Desa, Bidan Desa, Babinsa dalam pengawasan dan pengelolaan keuangan di Kantor Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang dalam penggunaan anggaran secara efektif.
4. Sumber daya manusia di Kantor Desa Condro kecamatan Pasirian kabupaten lumajang tingkat pendidikannya rata-rata lulusan SMA, S.Pd dan S.Sos tetapi tingkat kompetensi sumber daya manusia di kantor desa dalam proses penganggaran, penatausahaan, dan akuntansi belum ada yang lulusan sarjana Akuntansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ana Pratiwi, “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember” (Jurnal Orientasi Bisnis dan Entrepreneurship, archive.org), 03, No. 1 (2022), 1-9
- Ana Pratiwi, Dkk, “Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perikanan Di Indonesia”, (Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis, Politeknik Negeri Jember), 02, No. 1 (2022), 60-71
- Andiana, diakses pada tanggal 08 Desember 2023, pada jam 20.53 “laporan realisasi anggaran: unsur, contoh, dan cara membuatnya”, <https://majoo.id/solusi/detail/laporan-realisasi-anggaran>
- Arga Mulya. “Prinsip-Prinsip Penganggaran Desa”, diakses pada 17 Oktober 2023, pukul 12.08). <https://argamulya.desa.id/berita/detail/prinsipprinsip-penganggaran-desa>
- Arif Rivan, dkk “Penerapan Sistem Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa”, Jurnal Administrasi Publik, kemendikbud, 09, No. 2 (2019), 92-100, diakses pada tanggal 23 Desember 2023 pada jam 21.58
- Bantal desa, diakses pada tanggal 08 Desember 2023, pada jam 19.09 “Pendapatan”, <https://www.bantal.desa.id/artikel/2022/1/3/anggaran-pendapatan-dan-belanja-desa-apbdesa-tahun-anggaran-2022>
- Candira Dedi dan Hakim Kahar “Analisis Perencanaan Penganggaran Keuangan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang” (Jurnal *Governance dan Administrasi Publik*, Universitas Bengkulu), 3, No. 2 (2019), 11-19
- Desa Rarang Selatan “Tahapan Penyusunan APBDes”, diakses pada tanggal 08 Desember 2023, jam 18.42, <https://rarangselatan.desa.id/artikel/2017/8/28/tahapan-penyusunan-apbdes>
- Dr. Izza Mafruhah, SE, M.Si, Dkk, Data dan Informasi Manfaat Dana Desa di Provinsi Jawa Tengah, (Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi), 2018.
- Dr. Rahyunir Rauf, M.Si, Sri Maulidiah, S.Sos, M.Si, “Pemerintahan Desa”, (Yogyakarta: zanafa publishing: 2015), hal 2.
- Faisal Faresh Anjes dan Rosmiati Mia “Analisis Pengelolaan Aset Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Subang)”, (*Jurnal Indonesian Accounting Research*, Politeknik Negeri Bandung), 02, No. 02 (2022), 164-173

- Is'adi Munir dan Mauliyah Ika Nur "Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel Pada Lembaa Amil Zakat Azka Jember", (*Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri), 02, No. 2 (2022), 93-18
- Kementrian keuangan "Penatausahaan Keuangan Daerah", diakses pada tanggal 04 Desember 2023, pada jam 20.33, <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5753>,
- Lumingkewas S Gloria, "Kepatuhan Aparatur Desa Dalam Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018", (Studi Kasus Pada Desa Taraitak Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa)", (*Jurnal EMBA*, Universitas Sam Ratulangi, 09, No. 1 (2019). 163-172. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2023, pada jam 21.46
- Manoppo Sofia Eunike dan Walandouw Kho Stanley "Analisis Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe", (*Jurnal EMBA*, Universitas Sam Ratulangi), 07, No. 4 (2019), 4798-4807
- Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 51.
- Mauliyah Ika Nur, Dkk "Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember" (*Jurnal Bisnis Manajemen*, lapad.id), 01, No. 1 (2023), 95-108
- Nugroho, "Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)", (*Jurnal Akuntansi Manajemen & Perbankan Syariah*, Universitas Sains Al' Qur'an), 03, No. 2 (2023), 1-14
- Panda, diakses pada tanggal 08 Desember 2023, pada pukul 19.24, "Transparansi Pemerintah Desa: kunci Kepedulian dan Akuntabilitas", <https://www.panda.id/transparansi-pemerintahan-desa/>
- Parmono Agung dan Zuhriyyah Aminatus, "Pelaporan Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Jember", (*Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Jember), 06, No. 2 (2021), 209-241.
- Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), 218
- Rahmawati Yannisa, Dkk "Sistem Informasi Manajemen Daerah Dan Pengawasan Untuk Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah", (*Jurnal Of Economic*

and Bussiness Retail, Institut Teknologi dan Bisnis Diniyyah Lampung), 01, No. 1 (2021), 37-34

Ramly Yunika Rizka, “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Rumah Sakit Terhadap Kewajaran Laporan Keuangan (studi pada rumah sakit umum daerah toto kabila kabupaten bone bolango)”, “Jurnal Akmen”, 17, No. 1 (2020), 145-162, diakses pada tanggal 22 Desember 2023 pada jam 18.35

Romenda Yulia Ananta dan Ningsih Surasetyo Endang, “Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh”, (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Akuntansi, Universitas Syiah Kuala Lumpur, 05, No. 1 (2020), 50-58

Suwardi Endaswara, *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 112.

Syafrida Hafni Sahur, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), 6

Tim penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, hlm. 91

Wadiyo, SE, diakses pada tanggal 08 Desember 2023, pada jam 21.06 “Laporan Keuangan Desa”, <https://manajemenkeuangan.net/laporan-keuangan-desa/>

Wantah, “Analisis Penerapan PSAK No. 1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Pada Perum Bulog Divre Sulut dan Gorontalo”, (*Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Universitas Sam Ratulangi Manado), 15, No. 4, 74-88

Wawancara dengan Bapak Badriyo Susanto, S. Pd sebagai sekretaris di Kantor Desa Condro, 03 November 2023

Wawancara dengan Bapak Feri Irawan selaku Bendahara Desa di Kantor Desa Condro, 03 November 2023

Wawancara dengan Bapak Wawan Budi Setyo, S.sos selaku kaur Perencanaan di Kantor Desa Condro, 03 November 2023

Zaki, “Pengertian Akuntansi Desa dan Dasar Hukumnya”, diakses pada tanggal 11 Oktober 2021, pada pukul 12.45, <https://guruakuntansi.co.id/akuntansi-desa/>

Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021). 137

MATRIK PENELITIAN

| Judul | Variabel | Indikator | Sumber Data | Metode Penelitian | Fokus Masalah |
|---|--|--|--|--|---|
| <p>Analisis Penganggaran, Penatausahaan, dan Akuntansi Pada Laporan Keuangan (Studi Kasus Kantor Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penganggaran. 2. Penatausahaan. 3. Akuntansi. 4. Laporan Keuangan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat Rincian Pendapatan yang bersumberdana dari Pendapatan BLUD (jasa layanan, hibah, kerjasama, lain-lain yang sah) dan subsidi pemerintah (APBN, APBD). 2. Membuat Rincian Biaya (biaya operasional dan biaya non operasional). 3. Membuat Rincian Biaya berdasarkan Jenis Anggaran (belanja, pegawai, belanja barang & jasa, belanja modal). 4. Membuat Ringkasan Biaya berdasarkan program dan kegiatan. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Surat Perintah Pembayaran (SPP). 2. Pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM). 3. Pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat Jurnal Umum (Tutup Buku, Penyesuaian Persediaan, Aset Tetap). 2. Posting Buku Besar Umum. 3. Posting Buku Besar Pembantu 4. Menyiapkan Laporan Keuangan (Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan). <ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat Dipahami 2. Relevan 3. Keandalan 4. Dapat Dibandingkan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Responden: Perangkat Kantor Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. 2. Kepustakaan. 3. Jurnal. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Metode Kualitatif. 2. Pendekatan dan jenis penelitian : kualitatif dan deskriptif. 3. Lokasi Penelitian : Kantor Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang 4. Subyek Penelitian : <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Desa b. Sekretaris Desa c. Bendahara Desa d. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum e. Kepala Urusan Keuangan f. Kepala Urusan Perencanaan, 5. Teknik pengumpulan data: <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 6. Analisis data menggunakan analisis deskriptif 7. Keabsahan data menggunakan Teknik triangulasi data | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses Penganggaran, Penatausahaan, dan Akuntansi di Kantor Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang ? 2. Apakah proses Penganggaran, Penatausahaan, dan Akuntansi di Kantor Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang sesuai dengan standar di Indonesia? |

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lailatul Nur Faizah

NIM : 201105030006

Prodi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Alamat: Dusun Gentengan RT 007/RW 007, Desa Condro, Kecamatan
Pasirian, Kabupaten Lumajang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian yang berjudul “Analisis Penganggaran, Penatausahaan, dan Akuntansi Pada Laporan Keuangan (Studi Kasus Kantor Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang) tidak tedapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitan ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 27 Februari 2024
Saya yang menyatakan



Lailatul Nur Faizah
NIM, 201105030006

PEDOMAN WAWANCARA

1. Fokus : Analisis Penganggaran, Penatausahaan, dan Akuntansi Pada Laporan Keuangan (Studi Kasus Kantor Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang)?.

| No. | Pertanyaan |
|---------------------|---|
| PENGANGGARAN | |
| 1. | Bagaimana proses pengambilan keputusan terkait alokasi dana dalam penganggaran kantor desa? |
| 2. | Apakah ada kendala yang sering dihadapi dalam penyusunan anggaran di kantor desa dan bagaimana cara mengatasinya? |
| 3. | Apa Langkah-langkah yang di ambil untuk Menyusun anggaran di kantor desa? |
| 4. | Bagaimana desa memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakatnya? |
| 5. | Apakah ada strategi yang dilakukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dan anggara di kantor desa? |

| No. | Pertanyaan |
|------------------|--|
| AKUNTANSI | |
| 1. | Apakah sistem akuntansi di kantor desa sudah diatur dan di jalankan? |
| 2. | Bagaimana kompetensi dan keahlian staf yang terlibat dalam proses akuntansi di kantor desa? Apakah ada program pengembangan untuk meningkatkan ketrampilan mereka? |
| 3. | Bagaimana pengendalian internal diterapkan dalam sistem akuntansi kantor desa untuk mencegah kesalahan dan penyalahgunaan? |
| 4. | Apakah semua pencatatan akuntansi di kantor desa sudah di lakukan secara terorganisir? |
| 5. | Apakah ada pembagia tugas dan tanggungjawab dalam fungsi akuntansi di kantor desa? |

| No. | Pertanyaan |
|-------------------------|--|
| PENATAUSAHAAN | |
| 1. | Bagaimana proses penatausahaan dilakukan di kantor desa? |
| 2. | Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penatausahaan di kantor desa? |
| 3. | Bagaimana kantor desa menghadapi potensi kecurangan atau penyimpangan dalam penatausahaan? |
| 4. | Apakah ada tantangan yang sering dihadapi dalam penatausahaan di kantor desa? |
| 5. | Apakah semua penatausahaan telah dilakukan secara terorganisir? |
| No. | Pertanyaan |
| LAPORAN KEUANGAN | |
| 1. | Bagaimana tanggapan dan umpan balik Masyarakat terhadap laporan keuangan yang disajikan di kantor desa? Apakah ada upaya untuk meningkatkan transparansi dan pemahaman Masyarakat terhadap laporan keuangan? |
| 2. | Apakah kejelasan laporan keuangan di kantor desa dapat dipahami? |
| 3. | Apakah laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya? |
| 4. | Apakah laporan keuangan disusun dengan Bahasa yang dapat dipahami oleh semua pihak yang membacanya? |
| 5. | Apakah laporan keuangan harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya secara relevan? |



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-185 /Un.22/7.a/PP.00.9/10/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

18 Oktober 2023

Kepada Yth.
Kepala Desa Condro Kecamatan Pasirian
Jl. PB Sudirman No. 56, Kebonan, Condro, Kec, Pasirian. Kab. Lumajang

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Lailatul Nur Faizah
NIM : 201105030006
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Analisis Penganggaran, Penatausahaan, dan Akuntansi pada Kewajaran Laporan Keuangan (Studi Kantor Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang). di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih,



Ah. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nur Widyawati Islami Rahayu
Nur Widyawati Islami Rahayu



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN PASIRIAN
DESA CONDRRO

Jalan Raya Condro No. 56, Pasirian 67372

Email : desa.condro.kecamatan.pasirian@gmail.com , Website : condro-pasirian.lumajangkab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800.2/33/427.84.06/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : SUPIRNO, S.Sos.
N.I.K. : 3508041010600005
Jabatan : Kepala Desa Condro

Menerangkan bahwa :

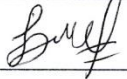

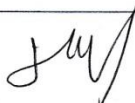
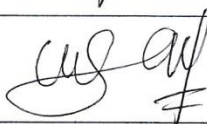


Nama : LAILATUL NUR FAIZAH
Nim : 201105030006
Program studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas : UIN KHAS Jember

Telah selesai melakukan penelitian di lingkungan Pemerintah Desa Condro terhitung tanggal 3 November 2023 sampai 22 Januari 2024 guna memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "ANALISIS PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN, DAN AKUNTANSI PADA LAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS KANTOR DESA CONDRRO KECAMATAN PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG "

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Condro, 22 Januari 2024
Kepala Desa Condro

SUPIRNO, S.Sos.

JURNAL KEGIATAN

| No. | Tanggal | Jenis Kegiatan | Paraf |
|-----|------------------|--|---|
| 1. | 12 Oktober 2023 | Mengantarkan surat izin penelitian. |  |
| 2. | 02 November 2023 | Wawancara bersama Bpk. Badriyo Susanto, S.Pd mengenai kondisi geografis & Demografis, Visi misi, Struktur organisasi Desa Condro. |  |
| 3. | 04 Desember 2023 | Wawancara bersama Bpk. Feri Irawan mengenai transparansi penganggaran dan akuntansi |  |
| 4. | 06 Desember 2023 | Wawancara Bersama Bpk. Wawan Budi Setyo, S.Sos mengenai penatausahaan |  |
| 5. | 15 Januari 2024 | Wawancara lanjutan bersama Bpk. Feri Irawan, Bpk. Wawan Budi Setyo mengenai transparansi penganggaran, penatausahaan, dan akuntansi di Kantor Desa Condro. |  |
| 6. | 22 Januari 2024 | Penelitian selesai dan meminta surat keterangan selesai penelitian. |  |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



DOKUMENTASI



Kantor Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang



Dokumentasi dengan Bapak Supirno, S.Sos selaku Kepala Desa



Dokumentasi Wawancara di Kantor Desa Condro



Dokumentasi wawancara di Kantor Desa Condro



Dokumentasi bersama dengan inti perangkat Desa

ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA DESA (APBDesa 2023) DESA GONDRO KECAMATAN PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG

| NO | JENIS / SUMBER PENDAPATAN | JUMLAH (Rp.) |
|----------------------------|--|------------------|
| 1. PENDAPATAN : | | |
| A | PENDAPATAN ASLI DESA : | 250.639.450,00 |
| 1. | TANAH KAS DESA | 179.300.000,00 |
| 2. | HASIL BUMDes | 71.339.450,00 |
| B | PENDAPATAN / DANA TRANSFER : | 1.883.428.127,00 |
| 1. | DANA DESA (DD) | 888.060.000,00 |
| 2. | BAGI HASIL PAJAK dan RETRIBUSI | 36.686.127,00 |
| 3. | ALOKASI DANA DESA (ADD) | 583.682.000,00 |
| 4. | BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN | 375.000.000,00 |
| 5. | PENDAPATAN LAIN-LAIN | 0,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN (A+B) | | 2.134.067.577,00 |
| 2. BELANJA : | | |
| NO | KEGIATAN / BIDANG | JUMLAH (Rp.) |
| 1 | PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | 848.162.166,23 |
| 2 | PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 907.122.000,00 |
| 3 | PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | 77.459.000,00 |
| 4 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 153.838.000,00 |
| 5 | PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT, DAN MENDESAK DESA | 180.000.000,00 |
| JUMLAH BELANJA (1+2+3+4+5) | | 2.166.581.166,23 |
| 3. PEMBIAYAAN : | | |
| NO | KEGIATAN | JUMLAH (Rp.) |
| A | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |
| | SILPA TAHUN 2022 | 32.513.589,23 |
| B | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 0,00 |
| JUMLAH PEMBIAYAAN (1-2) | | 32.513.589,23 |
| TOTAL SALDO | | 0,00 |

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) 2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Lailatul Nur Faizah
NIM : 201105030006
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : Analisis Penganggaran, Penatausahaan, dan Akuntansi Pada Laporan Keuangan (Studi Kasus Kantor Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang).

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 08 Maret 2024
Operator Turnitin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Mariyah Ulfa, M.EI

NIP. 197709142005012004



BIODATA PENULIS



A. Identitas Diri

Nama : Lailatul Nur Faizah
Nim : 201105030006
Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 31 Oktober 2001
Alamat : Dusun Gentengan RT 07 RW 07
Desa Condro Kec. Pasirian kab.
Lumajang
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Akuntansi Syariah
No. Telepon : 085856741876
Email : lailatulfaizah576@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN CONDRO 02
2. MTS MA'ARIF NU Nurul Islam Bades
3. MA Putri Nurul Masyithoh Lumajang
4. UIN KHAS Jember